



SPORT

Sempat Tertinggal, Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Usai Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti

Oleh Redaksi · 5 Okt, 23.36 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA — Timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati laga dramatis melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026).

Skuad Garuda harus melalui pertandingan hingga adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Indonesia

akhirnya memastikan kemenangan melalui drama tos-tosan dengan skor 4-2, setelah dua eksekutor Thailand gagal menjalankan tugasnya.

Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Luke Vickery mengancam gawang Thailand pada menit kedua, tetapi tembakannya masih dapat diamankan kiper Saranon Anuin. Enam menit kemudian,

Anuin kembali menggagalkan peluang Indonesia melalui tembakan jarak jauh Mitchell Baker.

Thailand merespons lewat peluang Teerasak Poeipimai pada menit ke-17. Namun, tembakannya masih mampu diamankan Emil Audero. Sesaat kemudian, Chanathip Songkrasin mencoba memanfaatkan serangan berikutnya, tetapi bola melambung di atas mistar.

Indonesia kembali mendapatkan peluang pada menit ke-19 melalui Ole Romeny. Menerima umpan silang Kevin Diks, Romeny melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih melambung.

[Selengkapnya di halaman 19 »](#)

NASIONAL

Setelah Dipecat, FORMASI Desak Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Jadi Tersangka



BANDA ACEH - Pemecatan Wisnu Hani Putranto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat kasus fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, dinilai

belum cukup untuk menjawab dugaan penyimpangan yang terjadi di balik keberadaan “klaster mewah” di dalam lapas.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

IN-DEPTH

Sinyal Prabowo Tempatkan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom



DA sesuatu yang menarik dari pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jumat, 2 Oktober 2026.

Bukan hanya soal pergantian pejabat dari Muhammad Qodari kepada seorang aktivis yang

selama bertahun-tahun dikenal kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga siapa yang kini berada di balik meja komunikasi pemerintah.

[Selengkapnya di halaman 23 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	13
OPINI	17
SPORT	19
HIBURAN	21
Aneka Berita	23

ACEH

Muhammad Saman Daftar Bakal Calon Ketua PWI Aceh 2026-2031



BANDA ACEH - Muhammad Saman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026-2031 pada hari pertama pembukaan pendaftaran, Senin (5/10/2026).

Muhammad Saman datang ke Sekretariat Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengambil formulir sekaligus mendaftarkan diri sebagai ...

[Selengkapnya di halaman 13 »](#)

NASIONAL

Buni Yani Desak MK Diskualifikasi Gibran: Anak Haram Konstitusi dan Manipulator Ijazah



BANDA ACEH - Pengamat komunikasi Politik Buni Yani mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) berani mengambil keputusan tegas terkait gugatan yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Buni Yani menilai MK harus mendiskualifikasi Gibran apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

SPORT

Local Clubs and the Fans Who Back Them

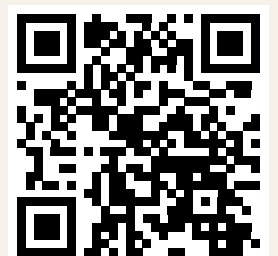


How Local Basketball Leagues Build Stronger Fan Communities in the Philippines

MANILA - A basketball team can do more for a town than entertain it on weekends. In the Philippines, provincial clubs have turned gyms into meeting places for whole communities.

[Selengkapnya di halaman 20 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

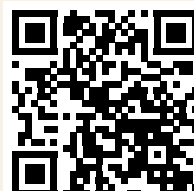


Pindai untuk berita terbaru

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

27 BERITA

NASIONAL

Buni Yani Desak MK Diskualifikasi Gibran: Anak Haram Konstitusi dan Manipulator Ijazah

Oleh Redaksi · 5 Okt, 20.45 WIB



Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pengamat komunikasi Politik Buni Yani mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) berani mengambil keputusan tegas terkait gugatan yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Buni Yani menilai MK harus mendiskualifikasi Gibran apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

"MK harus berani mendiskualifikasi Gibran, anak haram konstitusi dan manipulator ijazah. Fakta dalam persidangan MK sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah setingkat SMA yang menjadi syarat dalam Pilpres," kata Buni Yani kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administrasi. Buni Yani menilai dokumen

pengganti ijazah yang digunakan Gibran perlu diuji secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang muncul dalam persidangan.

Ia menyebut surat keterangan atau suket yang digunakan sebagai pengganti ijazah setingkat SMA patut dipertanyakan keabsahannya karena, menurut dia, tidak ditopang dokumen lain yang dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa Gibran telah memenuhi persyaratan pendidikan.

"Suket yang dipakai sebagai pengganti ijazah setingkat SMA adalah hasil manipulasi yang melibatkan Diknas karena waktu itu Jokowi masih berkuasa," ujarnya.

Buni Yani kemudian mengaitkan penerbitan dokumen tersebut dengan kondisi politik ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden. Namun, tuduhan mengenai adanya manipulasi dan keterlibatan pihak tertentu tersebut merupakan klaim Buni Yani dan perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang sah.

Menurut Buni Yani, apabila dalam persidangan memang ditemukan fakta bahwa persyaratan pendidikan Gibran tidak terpenuhi, MK tidak boleh mengabaikannya.

"Demi keadilan bagi bangsa dan negara, MK tak ada pilihan lain kecuali mendiskualifikasi Gibran. MK harus mengabulkan semua permohonan pemohon, karena itulah yang sesuai dengan keadilan substantif sesuai fakta yang muncul di persidangan," katanya.

Ia menegaskan, putusan MK semestinya berpijak pada fakta persidangan dan bukan pertimbangan politik. Menurutnya, lembaga penjaga konstitusi harus memastikan bahwa setiap calon yang menduduki jabatan publik benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan hukum.

"MK harus memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan karena dengan cara itulah kebenaran bisa ditegakkan. MK juga harus memutuskan sesuai dengan kebenaran substantif karena itulah

kebenaran yang hakiki dan sesungguhnya," ujar Buni Yani.

Buni Yani juga membawa persoalan tersebut pada kontroversi putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2024.

Ia menyebut putusan tersebut sebagai persoalan serius yang menurutnya telah membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Inilah momen MK harus bertobat akibat paman Gibran yang waktu itu menjadi Ketua MK telah secara zalim memperkosa persyaratan umur," kata Buni Yani.

Pernyataan tersebut merujuk pada putusan MK yang pada 2023 mengabulkan sebagian permohonan terkait syarat usia capres-cawapres. Putusan itu kemudian memungkinkan seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah, untuk maju sebagai capres atau cawapres meski belum ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Setelah Dipecat, FORMASI Desak Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Jadi Tersangka

Oleh Redaksi · 5 Okt, 20.35 WIB



BANDA ACEH - Pemecatan Wisnu Hani Putranto sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat kasus fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, dinilai belum cukup untuk menjawab dugaan penyimpangan yang terjadi di balik keberadaan "klaster mewah" di dalam lapas.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) Jali Pitoeng mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Ia meminta dugaan tindak pidana di balik fasilitas khusus tersebut ditelusuri hingga tuntas, termasuk kemungkinan adanya transaksi atau suap untuk mendapatkan fasilitas istimewa.

"Kalau memang ditemukan adanya pemberian uang atau keuntungan tertentu untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam lapas, maka persoalannya sudah masuk ranah pidana. Eks Kalapas harus diperiksa secara serius dan kalau alat buktinya cukup, harus ditetapkan sebagai tersangka," kata Jali Pitoeng kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Desakan itu disampaikan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasaran (Kemenimipras) resmi memberhentikan Wisnu Hani sebagai ASN pada Senin, 5 Oktober 2026. Inspektur Jenderal Kemenimipras Rudi Setiawan menyatakan Wisnu bersama Kalapas baru telah diperiksa dan dijatuhi hukuman.

Selain Wisnu, sebanyak 16 ASN lainnya di Lapas Cibinong juga mendapatkan sanksi dengan tingkat hukuman berbeda. Total terdapat 17 pegawai yang dikenai sanksi disiplin, terdiri atas satu pegawai yang diberhentikan, lima orang mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 orang mendapat hukuman disiplin sedang.

Namun, bagi Jali, pemecatan sebagai ASN belum otomatis menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting, yakni bagaimana fasilitas tersebut bisa tersedia, siapa yang menguasai, siapa yang mengizin-

kan, siapa penggunanya, serta apakah ada keuntungan finansial yang diterima pejabat atau petugas.

"Jangan sampai publik hanya disuguhi pemecatan. Pemecatan itu urusan disiplin kepegawaian. Kalau ada dugaan suap, pungutan atau jual beli fasilitas, itu harus dibuka dan diproses secara pidana," tegasnya.

Kasus ini bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di lingkungan lapas yang diduga dihuni warga binaan dan memiliki fasilitas jauh berbeda dari blok hunian biasa. Tim menemukan bangunan yang menyerupai rumah atau apartemen dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan, kamar tidur dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Ombudsman juga menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan mewah di kawasan tersebut. Tim bahkan menemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang sedang dibangun.

Yang membuat persoalan semakin serius, menurut Ombudsman, tim sempat mengalami penolakan ketika hendak masuk ke area blok sel. Di lokasi lain, Ombudsman bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai warga binaan yang berada di kawasan hunian tersebut, tetapi petugas lapas menghalangi komunikasi lebih lanjut dengan orang tersebut.

Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan terhadap jajaran Lapas Cibinong.

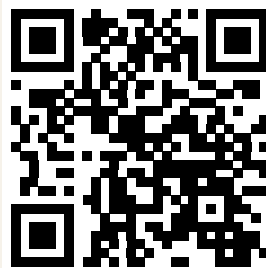
Pada 26 September 2026, Kemenimipras menonaktifkan lima pejabat struktural, yakni Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

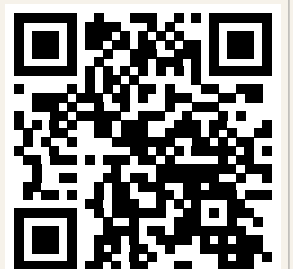
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Penyetaraan Pendidikan Gibran dari Data Absensi, Mikhael Sinaga: Itu Tak Ada Ijazahnya

Oleh Redaksi · 5 Okt, 19.48 WIB



BANDA ACEH - Pemilik Sentana TV, Mikhael Sinaga, menyinggung soal penyetaraan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka bukan dari ijazah atau tanda tamat belajar, tapi dari Certificate of Attendance atau sertifikat kehadiran.

Mikhael sendiri aktif mempertanyakan dan menyoroti keabsahan dokumen serta surat keterangan pendidikan/ijazah Gibran. Namun, ia menempatkan posisinya dalam kerangka menguji transparansi dan mekanisme hukum.

Sebagai lulusan luar negeri, Mikhael mengaku malu karena ijazah seperti itu tidak diakui, tapi justru dibuatkan surat keterangan menggunakan Certificate of Attendance,

"Saya sebagai lulusan luar negeri malu ijazah seperti ini tidak diakui, malah bikin surat keterangan pakai Certificate of Attendance."

"Certificate of Attendance itu absensi, tidak ada gelarnya, tidak ada ijazahnya gitu lho," ucap

Mikhael, Senin (5/10/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Sebelumnya, penggugat ijazah Gibran, Denny Indrayana bersikukuh bahwa Gibran tidak tamat SMA sederajat karena dokumen dari UTS Insearch Australia yang ditunjukkan Gibran hanyalah Certificate of Attendance dan transkrip nilai, bukan ijazah tanda tamat belajar.

Mikhael pun mengatakan sejak awal dirinya telah berulang kali menyampaikan bahwa Gibran dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan surat penyetaraan.

"Dari awal saya berbusa-busa ngomong bahwa Gibran itu tidak memenuhi syarat untuk surat penyetaraan karena salah satunya tidak belajar agama, tidak belajar Pancasila, tidak belajar bahasa Indonesia, maka apanya yang mau disetarakan?" ujarnya.

Sementara Ketum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyampaikan bahwa eks Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) atau ayah kandung Gibran tidak

mengkhawatirkan apa pun, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) karena gugatan tersebut tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

"Pak Jokowi tenang-tenang saja, tidak risau dengan sidang MK karena memang dasar yang digugat pun kan tidak memiliki bukti karena justru bukti itu ada di kita, soal sekolahnya Mas Gibran dan lain sebagainya."

"Termasuk apa yang menjadi persyaratan untuk diajukan sebagai Cawapres sebagai Wali Kota yang lalu. Semuanya sudah kita cek kok, Pak Jokowi sampaikan juga gitu," jelas Mardiansyah dalam kesempatan yang sama.

Mardiansyah lantas menilai wajar apabila Jokowi meyakini adanya politisasi dalam persoalan tersebut.

"Pertama, kepentingan banyak orang bertaut di situ. Kita melihat bagaimana orang berupaya untuk menyatukan kepentingan-kepentingan politiknya dalam kasusnya Jokowi dan kasusnya ijazah Mas Gibran," paparnya.

Adapun, ijazah Gibran itu digugat oleh eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana karena mempersoalkan dugaan ketidaklengkapan atau keabsahan syarat pendidikan (ijazah SMA/ sederajat) Gibran saat mendaftar sebagai calon wapres pada Pemilu 2024.

Hal tersebut dinilai tidak memenuhi syarat minimal pendidikan setingkat SLTA/SMA dalam Undang-Undang Pemilu. Atas dasar dugaan tidak terpenuhinya syarat calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat sejak awal pencalonan itu, para pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.

Para pemohon juga meminta agar MK membatalkan keputusan KPU, membatalkan pelantikan oleh MPR, hingga memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wapres baru.

NASIONAL

Refly Harun Pede Gugatan Ijazah Gibran Dikabulkan MK, Ini Alasannya

Oleh Redaksi · 5 Okt, 19.49 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum Denny Indrayana dan kawan-kawan, Refly Harun meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Keyakinan ini berdasarkan persoalan kebenaran substantif dan prosedural yang terungkap dalam persidangan.

Refly mengaku belum menerima undangan dari MK terkait sidang pengucapan putusan perkara tersebut. Dia memperkirakan sidang putusan digelar Selasa (6/10/2026), meski belum mengetahui waktu pelaksanaannya.

"Sampai hari ini kami tidak, belum mendapatkan undangan. Biasanya kalau ada sidang itu akan mendapatkan undangan dan firm waktunya kapan. Jadi, mungkin saja besok, tapi besoknya itu jam berapa kita tidak tahu," ucap Refly saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Meski putusan belum dijatuhkan, Refly mengaku yakin permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan timnya akan dikabulkan.

Dia menyebut, keyakinan itu berkaitan dengan dua aspek yang menurutnya muncul dalam persidangan, yakni kebenaran substantif dan prosedural.

"Ya, fakta persidangan yang paling gampang. Kan ini dua hal, antara kebenaran substantif sama kebenaran prosedural," tuturnya.

Refly menjelaskan, gugatan tersebut baru diajukan setelah Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden selama sekitar dua tahun. Dia menuturkan, permohonan diajukan karena ada persoalan baru terkait dokumen pendidikan Gibran yang tidak dipermasalahkan dalam persidangan PHPU Pilpres 2024.

"Karena ini adalah sesuatu yang belum pernah dipermasalahkan dalam persidangan tahun 2024 mengenai surat keterangan Gibran yang diduga bukanlah penyetaraan ijazah SLTA, tetapi hanya surat keterangan penyetaraan kemampuan, which is itu tidak sama,

maka kemudian diajukan sekarang," ucapnya.

Refly kemudian mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan. Dia menyimpulkan bahwa Gibran, yang menempuh pendidikan di luar negeri, tidak memiliki dokumen yang menurutnya dapat disetarakan dengan ijazah jenjang pendidikan SLTA di Indonesia.

"Dalam fakta persidangan terbukti. Ya, terbukti satu, dua hal yang paling, paling kicking. Satu, Gibran tidak punya sertifikat setara SLTA, apakah diploma, apakah sertifikat, atukah ijazah, atukah STTB, yang bisa dikatakan sebagai ijazah yang setara SMA," tuturnya.

"Jadi yang, yang disertakan Gibran ketika dia mendapatkan surat keterangan, itu adalah hanya yang namanya certificate of attendance, yaitu sertifikat daftar hadir, kehadiran. Certificate of attendance beda sama certificate of completion," kata dia.

Pernyataan soal certificate of attendance tersebut juga muncul dalam persidangan. Kemendikdasmen sebelumnya menerangkan bahwa dokumen yang diterima dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran antara lain certificate of attendance dan transkrip nilai.

Refly juga mempersoalkan proses penyetaraan pendidikan tersebut. Menurut dia, penyetaraan seharusnya didasarkan pada jenjang pendidikan yang telah diselesaikan, bukan dengan membandingkan mata kuliah yang pernah diambil dengan kompetensi lulusan SMK di Indonesia.

"Tetapi sekali lagi, dari Kemendikdasmen mengatakan bahwa mereka itu menyetarakan dari mata kuliah-mata kuliah yang diambil oleh Gibran di UTS Insearch. Lalu mata kuliah itu disamakan dengan SMK Indonesia, maka diperoleh kemampuan bahwa setara dengan tamatan SMK minat keuangan dan akuntansi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

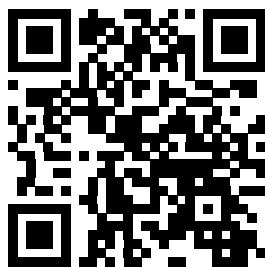
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Guntur Romli Soroti Suket Gibran: Ini Bukan Lagi Soal Administrasi, Bisa Masuk Pidana

Oleh Redaksi · 5 Okt, 20.40 WIB



Guntur Romli. FOTO/Net

BANDA ACEH - Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki ranah hukum pidana. Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menilai persoalan tersebut tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan administrasi pendidikan.

Guntur menyoroti dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran pada 2019. Menurutnya, berdasarkan keterangan yang muncul dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, dokumen dari UTS Insearch yang diterima Kementerian Pendidikan saat itu berupa certificate of attendance atau sertifikat kehadiran dan transkrip nilai.

“Ini bukan lagi soal administrasi. Ini membuka pintu pidana,” kata Guntur, seperti dikutip dari pernyataannya yang beredar terkait polemik dokumen pendidikan Gibran, Senin (5/10/2026).

Dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, pejabat Kemendikdasmen

memang menjelaskan bahwa dokumen dari UTS Insearch yang diajukan dalam permohonan penyetaraan antara lain certificate of attendance dan transkrip nilai. Pejabat tersebut juga mengakui bahwa pada saat pengajuan tidak terdapat ijazah dari UTS Insearch.

Hakim MK Saldi Isra bahkan mempertanyakan makna certificate of attendance tersebut. Dalam persidangan, pejabat Kemendikdasmen menjelaskan bahwa sertifikat tersebut lebih menunjukkan bahwa seseorang mengikuti pendidikan di UTS Insearch. Adapun status tamat atau tidak kemudian dinilai tim penyetaraan melalui transkrip dan keseluruhan riwayat pendidikan.

Persoalan inilah yang kemudian menjadi titik kritik Guntur.

Ia mempertanyakan bagaimana status tamat pendidikan dapat ditentukan apabila dokumen yang diterima kementerian tidak berupa ijazah, diploma, atau sertifikat kelulusan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Guntur juga menyoroti adanya nilai yang disebut fail dalam trans-

krip yang menjadi bagian dari dokumen penyetaraan. Menurut dia, rangkaian fakta tersebut perlu diperiksa secara terbuka untuk mengetahui apakah penerbitan surat keterangan penyetaraan pada 2019 telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan dokumen yang sah.

Namun, posisi pemerintah dalam persidangan berbeda. Kemendikdasmen menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan bukanlah penerbitan ijazah baru. Surat tersebut merupakan dokumen administratif pemerintah yang menerangkan padanan pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap keseluruhan riwayat pendidikan, kesinambungan jenjang, hasil belajar, transkrip, dan struktur kurikulum.

Kemendikdasmen juga menjelaskan bahwa pendidikan Gibran di UTS Insearch dinilai dengan cara menyandingkan sejumlah mata kuliah dengan struktur kurikulum SMK bidang Akuntansi dan Keuangan. Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penerbi-

tan surat keterangan penyetaraan pada 6 Agustus 2019.

Dari persoalan administrasi tersebut, Guntur kemudian membawa perdebatan ke ranah pidana.

Ia menyebut dugaan pemalsuan atau manipulasi dokumen dapat diperiksa menggunakan ketentuan pidana, antara lain Pasal 263, Pasal 266 dan Pasal 421 KUHP, tergantung pada konstruksi peristiwa dan pembuktian yang nantinya ditemukan aparat penegak hukum.

Pasal 263 KUHP lama mengatur mengenai pemalsuan surat. Sementara Pasal 266 berkaitan dengan keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam akta autentik, dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun. Karena itu, menurut Guntur, aparat penegak hukum memiliki alasan untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti awal yang menunjukkan adanya tindak pidana.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Cerita Pilu Bocah SD Sebelum Meninggal, ‘Mama Nanti Jemput Jangan Lama, Aqib Takut Mau Dipukulin’

Oleh Redaksi · 5 Okt, 20.16 WIB



BANDA ACEH — Diah Indriyanti (36 tahun) menuntut pengusutan tuntas kematian putranya, Muhammad Hasbi Al Aqib (7 tahun). Siswa kelas 2 di SDN 1 Kebondalem di Kabupaten Pematang, Jawa Tengah, itu diduga meninggal akibat dirundung dan dianiaya kakak kelasnya.

Diah mengungkapkan, sebelum meninggal, Aqib sempat menunjukkan sikap ketakutan. Pada Jumat (11/9/2026), Aqib meminta kepada ibunya agar tidak terlalu lama menjemputnya di sekolah. Diah menduga, saat itu putranya sudah menerima ancaman.

“Aqib bilang, ‘Mama, nanti jemputnya jangan lama. Aqib takut mau dipukulin’,” ungkap Diah menyitir permintaan putranya kepadanya kala itu, Senin (5/10/2026).

Pada Senin (14/9/2026), Aqib meminta uang saku lebih kepada Diah. Saat itu Aqib beralasan hendak membelikan teman-temannya jajan. Diah, yang belum memiliki kecurigaan, menuruti permintaan putranya.

Diah mengungkapkan, pada hari itu, Aqib menceritakan bahwa dia dipukuli. “Pas cerita itu bilang dipukuli di aula,” ujarnya.

Dia menambahkan pada malam keesokan harinya, Aqib mulai mengeluhkan rasa sakit di bagian perut dan belakang tubuhnya. Diah akhirnya memutuskan memeriksakan putranya ke dokter pada keesokan paginya.

Dari pemeriksaan tersebut, teridentifikasi bahwa Aqib turut mengalami memar di bagian lututnya. Dokter menyampaikan kepada Diah bahwa luka tersebut akibat semacam pukulan. Pada momen tersebut, Aqib pun menceritakan apa yang dialaminya kepada dokter.

“Saya dan suami langsung drop. Terus langsung disuruh ke IGD,” ujar Diah.

Dia menerangkan, saat berada di rumah sakit, staf medis menyampaikan bahwa prosedur visum

hanya bisa dilakukan dalam kurun 1x24 jam. “Pikiran saya waktu itu yang penting anak saya sehat kembali seperti semula. Akhirnya dirawat di sana delapan atau sembilan hari,” ucapnya.

Diah mengungkapkan, setelah dirawat hampir 10 hari, Aqib akhirnya diperbolehkan pulang. Namun kondisi Aqib tak banyak berubah. “Kalau digendong untuk dibangunin itu mengeluh sakit. Terus muntah-muntah,” katanya.

Pada 30 September 2026, hendak dibawa lagi ke rumah sakit setelah tiga hari di rumah pascaperawatan pertama, Aqib justru meninggal dunia. Kendati demikian, Diah masih sempat mencoba membawa putranya kembali ke rumah sakit.

“Barangkali bisa dari Gusti Allah, saya bawa lagi ke rumah sakit dalam keadaan sudah seperti itu. Pihak rumah sakit bilang memang sudah tidak ada (meninggal),” ujarnya.

Karena curiga putranya menjadi korban perundungan dan penganiyaan, Diah melaporkan kasus tersebut ke Polres Pematang. Kepolisian kemudian menyarankan agar jenazah Aqib langsung diautopsi.

Diah mengaku belum memperoleh cerita lengkap dari almarhum putranya terkait apa yang dialaminya, termasuk soal dugaan perundungan. “Karena anak saya itu memang pendiam,” katanya.

Dia berharap kasus kematian putranya bisa diusut tuntas. Jika memang Aqib menjadi korban perundungan dan penganiyaan, Diah menuntut agar pelaku diadili seadil-adilnya.

Penyelidikan

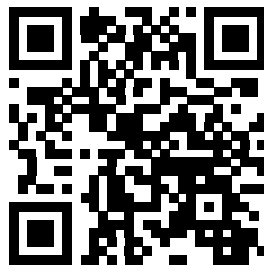
Kasatreskrim Polres Pematang AKP M. Faizal Wildan Umar Rela mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa delapan saksi dalam kasus kematian Aqib yang diduga akibat aksi perundungan. Empat saksi di antaranya merupakan siswa sekolah tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

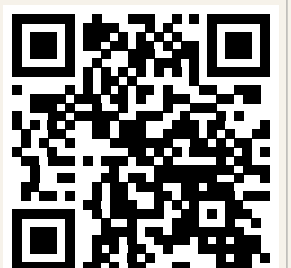
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Komisi Pemberantasan Korupsi Takut Periksa Nusron Wahid?

Oleh Redaksi · 5 Okt, 13.34 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan mega korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Nusron Wahid memasuki titik krusial.

Di tengah temuan uang tunai fantastis mencapai Rp106,3 miliar dan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid justru belum juga dilakukan.

Lambannya pemanggilan Nusron kini memunculkan sorotan baru. Persoalannya bukan lagi sekadar apakah Menteri ATR/BPN akan diperiksa, melainkan apakah proses hukum terhadap pucuk pimpinan kementerian tersebut tersandera prosedur perizinan Presiden Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menduga persetujuan Presiden untuk pemeriksaan Nusron hingga kini belum diterbitkan.

Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat memeriksa Nusron secara langsung.

“Faktanya, dugaan saya, sampai dengan saat ini persetujuan Presiden untuk pemeriksaan Nusron itu belum ada. Jadi ini yang menghambat dapat diperiksanya Nusron Wahid atau diperjelas keterkaitannya,” ujar Chairul dikutip Senin (5/10/2026).

Menurut Chairul, secara konstruksi perkara, dugaan keterkaitan Nusron sebenarnya sudah memiliki pijakan yang cukup untuk ditelusuri lebih jauh. Salah satu faktornya adalah hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang kemudian membuka temuan uang tunai dalam jumlah sangat besar.

Angka Rp106,3 miliar tersebut kini menjadi salah satu titik penting dalam pengusutan. Sebab, perkara korupsi tidak berhenti pada siapa yang menerima atau menyerahkan uang, tetapi juga harus menjawab pertanyaan paling sensitif: uang itu berasal dari mana, bergerak melalui siapa, dan akhirnya bermuara ke mana?

Di titik inilah penyidik KPK masih dituntut bekerja lebih dalam. Salah satu isu yang muncut adalah dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pembiayaan gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

KPK perlu memastikan apakah dana tersebut benar-benar merupakan kontribusi yang sah atau justru memiliki keterkaitan dengan hasil tindak pidana.

Jika uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan tertentu dengan cara menyamarkan asal-usulnya, maka persoalannya dapat berkembang ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dengan demikian, perkara ini bukan sekadar soal uang suap dalam layanan pertanahan. Ada dugaan rantai aliran uang yang harus dibongkar sampai ke ujung.

Empat Tersangka Dekat Nusron, Desakan Mundur Menguat

Tekanan Politik pun mulai mengiringi proses hukum. Ketua Great Institute, Syahganda Nainggolan, meminta Nusron Wahid

mengambil sikap gentleman dengan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih.

Desakan tersebut muncul setelah empat dari delapan tersangka KPK, yakni Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry, disebut memiliki kedekatan khusus dengan Nusron.

Syahganda menilai Nusron tidak semestinya membiarkan Presiden Prabowo berada dalam posisi harus memberikan perlindungan politik terhadap dirinya di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

“Jangan dia membuat presiden pasang perisai terhadap dirinya. Harus dia sendiri yang mengatakan... saya mengundurkan diri,” tegas Syahganda.

Desakan tersebut sekaligus menempatkan Nusron dalam posisi dilematis. Di satu sisi, KPK belum menyatakan Nusron sebagai tersangka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Viral Fenomena Jasa Joki Baca Buku, Bayar hingga Rp1,6 Juta demi Terlihat Kutu Buku

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.42 WIB



BANDA ACEH - Fenomena jasa joki kembali mencuri perhatian di media sosial. Setelah sebelumnya muncul jasa joki Strava, kini viral tawaran jasa joki baca buku dengan tarif mencapai Rp1,6 juta.

Tawaran tersebut muncul melalui akun Threads @inilindri. Pemilik akun menawarkan jasa membaca buku milik orang lain, mulai dari buku fiksi hingga non-fiksi, dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.

“Open jasa Joki Baca Buku. English, Indonesia. Fiksi, non fiksi, siap semua genre,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Jasa ini menerima buku dengan ketebalan mulai 100 hingga 800 halaman. Tidak hanya membaca, buku pelanggan juga akan diberi berbagai penanda agar terlihat seperti sudah dibaca dan dikaji secara menyeluruh.

Paket yang ditawarkan mencakup crochet bookmark serta sticky note transparan. Pelanggan juga mendapatkan stick index page marker untuk menandai bagian-bagian tertentu dalam buku.

Pemilik akun bahkan menawarkan layanan foto buku setelah selesai dikerjakan. Foto tersebut dapat digunakan pelanggan untuk kebutuhan konten di media sosial.

“Bisa sekalian difoto-fotoin juga kalau mau buat sosmed,” lanjutnya.

Tawaran tersebut sontak membuat pengguna Threads penasaran. Sebagian netizen mempertanyakan tujuan seseorang membayar orang lain untuk membaca buku miliknya.

Pemilik jasa kemudian menjelaskan target layanan tersebut melalui kolom komentar. Dia

menyebut jasa joki baca buku ditujukan terutama bagi orang yang ingin membangun citra sebagai pencinta buku di media sosial.

“Target market utamanya untuk orang yang mau terlihat seperti bookworm/bookstagram,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan mekanisme layanan tersebut. Pelanggan cukup mengirimkan buku yang belum sempat dibaca, kemudian buku tersebut akan dibaca dan diberi berbagai tanda.

“Kakaknya punya buku tapi males bacanya, kirim ke aku nanti aku baca, buat highlight, kasih penanda, pokoknya dibuat sampe terlihat udah dibaca berkali-kali,” kata pemilik akun.

Setelah pengerjaan selesai, buku dikirim kembali kepada pemiliknya. Kondisi buku pun akan dipenuhi highlight, penanda halaman, serta sticky note sehingga tampak seperti sudah beberapa kali dibaca.

Tarif jasa joki baca buku tersebut bervariasi, mulai Rp700 ribu hingga Rp1,6 juta, tergantung ketebalan buku dan kebutuhan pengerjaan.

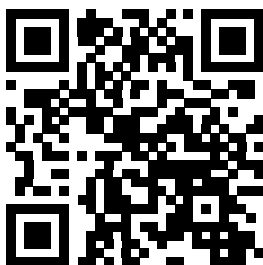
Fenomena ini menjadi salah satu contoh munculnya jenis jasa yang tidak biasa di media sosial. Jika umumnya jasa joki berkaitan dengan tugas atau pekerjaan tertentu, layanan ini menawarkan diri untuk membaca buku atas nama orang lain sekaligus membuatnya terlihat seperti aktivitas membaca pribadi.

Unggahan tersebut pun ramai diperbincangkan karena berkaitan dengan kebiasaan membangun citra sebagai pencinta buku atau bookworm di media sosial

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

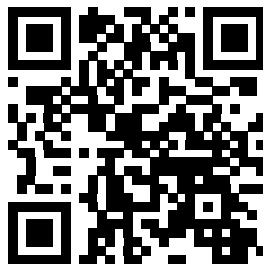
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Saatnya Prabowo Pilih KPK dan Kejagung Baru, Muslim Arbi: Jangan Ada Lagi Ewuh-Pakewuh

Oleh Redaksi · 5 Okt, 13.36 WIB



BANDA ACEH – Pergantian besar-besaran di tubuh Polri setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri dinilai perlu menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan lembaga penegak hukum lainnya.

Pengamat hukum dan Politik Muslim Arbi menilai, setelah melakukan pergantian di tubuh Polri, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan penyegaran kepemimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Pandangan tersebut disampaikan Muslim Arbi dalam catatan bertajuk “Catatan Hari ABRI, Saatnya Prabowo Pilih Kejagung dan KPK Baru”, Senin (5/10/2026).

“Setelah ini, publik juga mendambakan Presiden Prabowo dapat melakukan perombakan dan penggantian pimpinan Kejaksaan dan KPK agar tindakan KPK dan Kejaksaan Agung RI sesuai dengan visi dan misi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sesuai janji Prabowo,” kata Muslim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).

Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026.

Sehari setelah resmi menjabat, Suyudi langsung melakukan rotasi besar di tubuh Polri. Sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah dimutasi, termasuk 14 jabatan strategis pejabat utama Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Langkah tersebut menjadi sorotan karena perubahan menyentuh sejumlah posisi strategis, antara lain Kabareskrim, Kabaintelkam, Kabaharkam, Irwasum, Kalemdiklat, serta jajaran Kapolda.

Menurut Muslim, langkah penyegaran di tubuh Polri tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur kepemimpinan dapat menjadi bagian dari upaya mem-

perkuat kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Langkah Kapolri baru asal Pandeglang ini merupakan suatu langkah cukup revolusioner untuk memperbaiki citra Kepolisian yang selama ini menjadi sasaran kritik publik. Tindakan Jenderal Suyudi patut diapresiasi,” ujarnya.

Muslim kemudian mengarahkan sorotannya kepada KPK dan Kejaksaan Agung.

Dia berpandangan, Presiden Prabowo perlu memastikan dua institusi tersebut memiliki kepemimpinan yang mampu menjalankan agenda pemberantasan korupsi tanpa terbebani kepentingan politik maupun kekuasaan.

“Jika Prabowo menghendaki penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta KKN dapat berjalan sukses, maka pimpinan KPK dan Kejaksaan juga diganti sebagaimana pimpinan Polri,” tegasnya.

Namun, pernyataan mengenai perlunya pergantian pimpinan KPK dan Kejaksaan tersebut

merupakan pandangan Muslim Arbi.

Secara faktual, KPK saat ini dipimpin Setyo Budiyo bersama jajaran pimpinan periode 2024–2029. KPK sendiri masih menjalankan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan integritas kelembagaan.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pada Agustus 2026, Burhanuddin masih tercatat melantik sejumlah kepala kejaksaan tinggi dan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.

Muslim menilai publik membutuhkan lembaga penegak hukum yang dapat bekerja tegas dan tidak ragu ketika penegakan hukum bersinggungan dengan kepentingan politik.

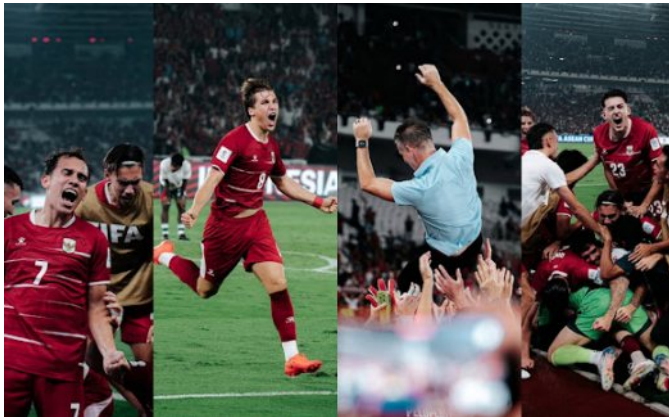
“Publik merasakan KPK dan Kejaksaan belum gesit dan tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN, apalagi jika bersentuhan dengan kepentingan politik dan kekuasaan Joko Widodo,” katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Denny Indrayana: Malam Ini Garuda Menang, Besok Kita Syukuran Gibran Dimundurkan

Oleh Redaksi · 5 Okt, 23.30 WIB



BANDA ACEH - Polemik soal posisi Gibran Rakabuming Raka memasuki babak yang kembali menyita perhatian menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pemohon perkara terkait syarat pendidikan Gibran, Denny Indrayana, bahkan memperkirakan putusan akan dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, besok.

“Banyak sekali yang tanya saja kapan sidang putusan MK soal dis kualifikasi Gibran, saya duga sidangnya besok, Selasa, 6 Oktober 2026,” ungkap Denny di akun X, Senin (5/10/2026).

Denny menyebut ada dua alasan yang mendasari perkiraannya tersebut. Pertama, ia menilai batas waktu paling lama 14 hari kerja untuk memutus perkara jatuh pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kedua, ia mengaitkannya dengan pertandingan final sepak bola Indonesia versus Thailand yang berlangsung Senin malam.

“Alasannya, satu, batas waktu paling lama memutus dalam 14 hari kerja jatuh tempo besok, Selasa. Kedua, Senin malam ini ada final sepak bola Indonesia vs Thailand. Jangan sampai masalah Gibran mengganggu acara nonton final bola,” ujarnya.

Denny kemudian menyampaikan harapannya terkait hasil pertandingan sekaligus perkara yang diajukannya di MK.

“Malam ini Garuda harus menang, besok kita syukuran Gibran dimundurkan. Setuju?” pungkas Denny Indrayana.

Pernyataan tersebut kemudian direspons Dedy Nur Palakka. Politisi PSI itu menilai proses untuk memundurkan seorang wakil presiden tidak sesederhana yang disampaikan Denny.

“Tidak segampang itu memundurkan seorang Wakil Presiden,” tulis Dedy di akun X, Senin (5/10/2026).

Dedy bahkan mempertanyakan kewenangan MK dalam persoalan tersebut. Menurutnya, Gibran tetap akan menjalankan mandatnya sebagai Wakil Presiden RI sesuai konstitusi.

“MK juga sama sekali ngga punya kewenangan itu,” ujarnya.

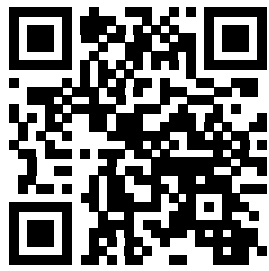
“Jadi, Gibran Rakabuming Raka akan tetap jadi Wapres RI sesuai dengan amanat konstitusi,” tambah Dedy.

Adapun perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama para pemohon lainnya tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pendidikan saat maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan membatalkan pelantikannya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

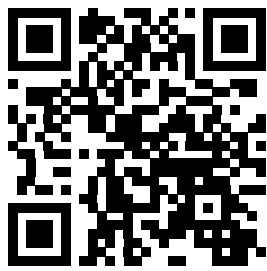
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

JPU Tantang Klaim Roy Suryo soal 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu: Buktikan di Persidangan

Oleh Redaksi · 5 Okt, 13.30 WIB



BANDA ACEH — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan klaim terdakwa Roy Suryo yang menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) 99,9 persen palsu harus dibuktikan melalui proses persidangan.

Penegasan itu disampaikan JPU saat membacakan tanggapan atas perlawanan atau eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (5/10/2026).

JPU menilai pernyataan mengenai angka 99,9 persen tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa terdapat 0,1 persen bagian ijazah yang asli, valid, atau benar.

"Terhadap dalil perlawanan mengenai perbedaan antara pernyataan 99,9 persen palsu dengan 100 persen palsu, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa tim advokat terdakwa telah menarik kesimpulan yang belum mampu

nyai dasar pembuktian, ketika menyatakan angka 99,9 persen palsu berarti terdapat 0,1 persen bagian yang asli, valid, atau benar," kata jaksa dalam persidangan.

JPU menegaskan pihaknya tidak sedang menyamakan angka 99,9 persen dengan 100 persen secara matematis.

Menurut jaksa, sebelum menarik kesimpulan dari angka tersebut, harus terlebih dahulu dijelaskan apa yang sebenarnya diukur serta metode yang digunakan untuk menghasilkan persentase tersebut.

"Bagaimana metode pengukurannya, serta apakah persentase tersebut dimaksudkan sebagai tingkat keyakinan terhadap suatu kesimpulan, proporsi bagian dokumen, atau bentuk penegasan dalam suatu pernyataan," ujar jaksa.

Jaksa juga menilai tingkat keyakinan terhadap suatu kesimpulan tidak dapat langsung disamakan dengan persentase bagian fisik

ataupun digital dari sebuah dokumen.

Karena itu, berbagai persoalan yang diajukan pihak Roy Suryo, termasuk bukti fisik, bukti elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, metode ELA, hingga makna pernyataan 99,9 persen palsu, dinilai masih harus diuji melalui pembuktian di persidangan.

JPU menegaskan tugas mereka bukan sekadar membuktikan atau menjelaskan angka persentase yang disebut Roy Suryo. Jaksa juga berkewajiban membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

"Bahwa terbukti atau tidak terbukti tindak pidana secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi dasar bagi penjatuhannya sanksi atau putusan bebas," kata jaksa.

Menurut JPU, dalil-dalil yang diajukan pihak Roy Suryo belum

cukup untuk menyatakan surat dakwaan kabur atau obskur libel.

Jaksa menilai persoalan mengenai bukti dan hasil pemeriksaan terhadap ijazah masih merupakan bagian dari materi pembuktian yang harus diperiksa dalam persidangan.

"Keseluruhan persoalan tersebut memerlukan pemeriksaan pembuktian dan belum memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pencantuman hasil pemeriksaan ijazah fisik telah menjadikan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap," ujar jaksa.

Dengan demikian, JPU meminta majelis hakim tidak menjadikan perdebatan mengenai angka 99,9 persen sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan terhadap Roy Suryo kabur. Kebenaran atas berbagai klaim dan bukti yang diajukan masing-masing pihak akan ditentukan melalui proses pembuktian di persidangan

NASIONAL

Terkuak! Miras di Lapas Mewah Cibinong Milik Jimmy Masrin, Bukan Kasi Kamtib

Oleh Redaksi · 5 Okt, 20.27 WIB



BANDA ACEH - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) mengungkap minuman keras (miras) yang ditemukan di salah satu rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, bukan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong Adi Nugroho Wicaksono.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menerangkan, berdasarkan hasil investigasi, miras itu milik warga binaan yang menempati rumah tersebut, yakni Jimmy Masrin.

"Barang tersebut bukanlah milik sebagaimana yang disebutkan Kasi Kamtib atas nama Adi Nugroho Wicaksono, melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut," terang Rudi dalam konferensi pers bersama Ombudsman RI di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Kepemilikan barang tersebut juga diperkuat dengan temuan pas foto dan rekaman kamera hasil inspeksi dadakan (sidak) Ombudsman RI pada Rabu (23/9) di rumah tersebut. Kata Rudi, sosok laki-laki bercelana pendek yang terlihat dalam rekaman merupakan Jimmy Masrin.

"Yang sebagaimana sudah terlihat di pas fotonya apa itu fotonya

kemarin, itu atas nama Jimmy Masrin," katanya.

"Dan yang terlihat di dalam kameranya, itu adalah Pak Jimmy Masrin sendiri. Ya, jadi barang-barang yang di sana itu milik Pak Jimmy Masrin dan yang terlihat di dalam kamera itu adalah Pak Jimmy Masrin," jelas Rudi.

Sebelumnya, eks Direktur Jenderal Pemasarakatan (Dirjen PAS) Kemenimipas Mashudi menyebut temuan miras itu milik Kasi Kamtib Lapas Kelas IIA Cibinong Adi Nugroho Wicaksono.

Hal itu disampaikan Mashudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9).

Namun, hasil investigasi internal Kemenimipas menyatakan barang tersebut bukan milik petugas, melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut.

Rudi juga mengatakan, barang-barang mewah lainnya yang ditemukan di area tersebut berasal dari warga binaan yang menggunakan dan mengadakannya.

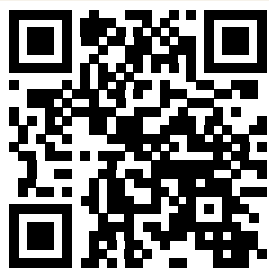
"Barang-barang milik atau barang mewah lainnya juga sama, itu diadakan oleh warga binaan yang menggunakan dan mengadakannya," kata Rudi.

Jimmy Masrin belum berko-mentar soal penemuan miras tersebut.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

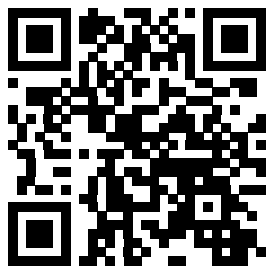
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rocky Gerung dan Syahganda Masuk Istana, Golkar Yakin Sikap Kritis Tak Akan Luntur

Oleh Redaksi · 5 Okt, 10.01 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Idrus menilai, bergabungnya dua figur yang selama ini dikenal vokal dalam menyampaikan kritik ke dalam pemerintahan tidak otomatis membuat sikap kritis mereka menghilang. Menurutnya, posisi tersebut dinilai dapat membuka ruang yang lebih luas agar gagasan dan masukan kepada pemerintah bisa disampaikan secara langsung.

"Yang tentu kita tidak inginkan adalah ketika ada di dalam, daya kritisnya tidak ada lagi atau hilang," kata Idrus kepada wartawan, Senin (5/10).

Menurut Idrus, kritik tidak harus selalu datang dari luar pemerintahan. Hal yang lebih penting

kritik tersebut mampu diterima dan digunakan sebagai bahan evaluasi maupun perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia berpandangan, berada di dalam pemerintahan justru memberikan kesempatan lebih besar bagi seseorang untuk berinteraksi dengan para pengambil kebijakan. Dengan begitu, komunikasi antara pemberi masukan dan pemerintah dapat berlangsung lebih intensif.

"Kalau ada di dalam, maka tentu peluang untuk ketemu, untuk berkomunikasi dengan pusat kekuasaan itu sangat-sangat memiliki peluang yang lebih besar dan frekuensi yang lebih besar," ujarnya.

Idrus mengajak masyarakat melihat keputusan Prabowo tersebut dalam konteks yang lebih luas. Menurut dia, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga Indonesia sebagai rumah bersama, terlepas dari apakah seseorang berada di dalam struktur pemerintahan atau tidak.

"Indonesia ini adalah rumah kita bersama yang harus kita rawat

secara bersama dan berperan sesuai dengan posisi dan profesi kita masing-masing," ucap Idrus.

Ia menegaskan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya tidak selalu ditempatkan dalam posisi berhadapan-hadapan. Keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam Rumah Besar kita, Indonesia, antara Pemerintah dan Masyarakat adalah satu kesatuan sebagai Penghuni dan Pemilik Rumah bersama, karena itu, mereka bukan lawan, bukan musuh, tetapi mitra bahkan sesama anggota Keluarga Besar dalam Rumah Besar kita, Indonesia," tegas Idrus.

Dalam konteks penunjukan Rocky Gerung, Idrus melihat keputusan Prabowo sebagai salah satu cara untuk membuat gagasan dan kritik yang selama ini disampaikan Rocky memiliki saluran yang lebih efektif di lingkungan pemerintahan.

"Karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Rocky ini adalah strategi bagaimana fungsi peran yang dilakukan selama ini dapat berjalan efektif," tutur Idrus.

Idrus pun menyatakan dukungannya terhadap Rocky. Ia berharap masuknya Pengamat Politik tersebut ke dalam struktur pemerintahan tidak mengubah karakter kritis yang selama ini melekat pada dirinya.

"Saya kira kita dukung sepenuhnya. Bagaimana kritikan dan masukannya bisa berjalan efektif," ujarnya.

Selain Rocky, Idrus juga memberikan dukungan terhadap keputusan Prabowo menunjuk Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom. Menurutnya, Syahganda memiliki pengalaman dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi pemerintah kepada publik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co

NASIONAL

Posisi di Wantimpres Ujian Bagi Karakter Rocky Gerung

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.37 WIB



BANDA ACEH -Rocky Gerung resmi bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rocky dilantik bersama 25 anggota Wantimpres lainnya di Istana Negara pada 2 Oktober 2026.

Bagi pengamat hukum dan Politik Muhammad Gumarang, bergabung ke dalam pemerintahan adalah ujian tersendiri bagi Rocky Gerung.

Kata Gumarang, selama ini radical break menjadi karakter politik Rocky untuk membangun daya tarik publik sekaligus nilai tawar terhadap penguasa.

Gumarang mengatakan posisi Rocky kini berbeda dengan ketika dirinya berada di luar pemerintahan sebagai pengamat. Sebagai anggota Wantimpres, Rocky bekerja dalam sebuah kelembagaan dan memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada presiden.

"Kalau Rocky Gerung sudah menjadi bagian dari pemerintahan sebagai anggota Wantimpres, tentu dia tidak bisa semau gue seperti ketika berada di luar pemerinta-

han. Dia terikat aturan organisasi dan bekerja secara kolektif kole-gial," ujar Gumarang kepada wartawan, Senin 5 Oktober 2026.

Ia menilai perbedaan posisi tersebut membuat ruang gerak Rocky sebagai pengkritik menjadi lebih terbatas. Ketika masih berada di luar pemerintahan, Rocky dapat menyampaikan kritik sebagai individu tanpa terikat struktur kelembagaan, sedangkan sebagai anggota Wantimpres ia memiliki tanggung jawab jabatan dan menerima fasilitas dari negara.

Gumarang menekankan, posisi Rocky di dalam Wantimpres akan menguji konsistensinya dengan berbagai pandangan yang selama ini ia sampaikan ketika berada di luar pemerintahan.

Sambungannya, Rocky sendiri setelah pelantikan menyatakan bahwa dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam pemerintahan dan tetap mempertahankan pandangan radical break.

"Rocky Gerung mungkin menyadari bahwa dia tidak akan bisa melakukan radical break seperti ketika menjadi pengamat," pungkas Gumarang.

NASIONAL

Geruduk Gedung DPR, Ini 4 Tuntutan BEM SI

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.29 WIB



BANDA ACEH -Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggeruduk Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin sore, 5 Oktober 2026.

BEM SI berunjuk rasa yang berunjuk rasa di depan gedung wakil rakyat itu menuntut pendidikan gratis hingga mendesak perbaikan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam aksinya, BEM SI membawa sedikitnya empat tuntutan aksi, yakni:

1. Mendesak pembahasan dan revisi UU Sisdiknas secara partisipatif dan komprehensif,
2. Mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis,

3. Mendesak pemerintah menyejahterakan guru dan tenaga kependidikan,

4. Menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin siang, 5 Oktober 2026.

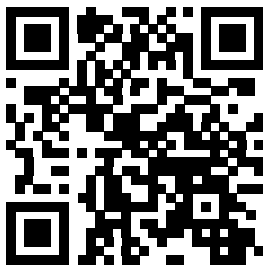
Dalam aksinya, mahasiswa dari LMND ini juga menyuarakan aspirasi perihal pendidikan gratis.

Mereka yang mengibarkan bendera berkelir merah itu menuntut pendidikan gratis tanpa syarat

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Pengakuan Eks Mendikbud soal Penyetaraan Ijazah Gibran: Belum Pernah Urusan Itu Sampai ke Saya

Oleh Redaksi · 5 Okt, 10.06 WIB



BANDA ACEH - Polemik seputar surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA)/ sekolah menengah kejuruan (SMK) luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Mendikbud, ia tidak pernah menangani atau memproses surat keterangan penyetaraan ijazah dari luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir melalui keterangan tertulis pada Sabtu (3/10/2026).

Menurutnya, prosedur administrasi untuk penyetaraan ijazah tingkat sekolah menengah memang tidak pernah sampai ke meja menteri.

"Selama saya jadi Mendikbud belum pernah ada satu pun urusan semacam itu sampai ke saya," ungkap Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan, kewenangan teknis penerbitan surat kete-

rangan penyetaraan ijazah luar negeri setingkat SMA/SMK sepenuhnya berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjendikdasmen).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Mendikbud era Mohammad Nuh.

"Berdasarkan Permendikbud 29 Tahun 2014, urusan penyetaraan ijazah luar negeri tidak sampai ke menteri. Urusannya sudah dilimpahkan ke Dirjen," jelasnya.

Denny Indrayana Persoalkan Penerbitan 'Superkilat'

Gugatan terkait keabsahan dan prosedur penyetaraan ijazah Gibran sebelumnya diajukan oleh Denny Indrayana bersama rekan-rekannya di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pantauan dari laman resmi MK, persidangan perkara ini telah memasuki agenda pembuktian.

Pada sidang yang digelar Jumat (2/10/2026), majelis hakim men-

dengarkan keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.

Dalam risalah persidangan, Denny Indrayana dkk mengkritisi proses penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ditjendikdasmen karena terindikasi diproses secara "superkilat".

Atas dasar tersebut, pihak pemohon meminta MK untuk:

- Menyatakan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi ketentuan.
- Membatalkan pelantikan dan mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pemerhati Sebut MK Hanya Akan Kabulkan Sebagian Permohonan

Di sisi lain, Anggota Bonjowi (Bongkar Ijazah Jokowi), Lukas Luwarso, memberikan prediksinya terkait arah putusan MK atas permohonan Denny Indrayana cs.

Lukas meyakini MK tidak akan mengabulkan seluruh poin guga-

tan, terutama terkait tuntutan diskualifikasi.

Menurut Lukas, pemakzulan atau diskualifikasi pejabat yang telah dilantik berada di luar domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

"Jadi, menurut perkiraan saya, dari delapan gugatan itu, paling hanya dua poin yang akan diputuskan oleh MK, karena yang lain itu sudah di luar wewenang MK," kata Lukas dalam dialog Sapa Indonesia Malam KompasTV, Sabtu (3/10/2026).

Lukas memperkirakan MK hanya akan mengafirmasi dua poin utama, yakni:

Poin Kedua: Menyatakan bahwa syarat pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden bersifat imperatif serta wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Poin Keempat: Menyatakan bahwa penetapan Gibran sebagai cawapres pada Pemilu 2024 mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

NASIONAL

Akhirnya Ombudsman Ungkap 4 Napi Penghuni Klaster Mewah Lapas Cibinong: Jimmy Masrin hingga Indra Kenz

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.49 WIB



BANDA ACEH - Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengungkapkan empat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias narapidana (napi) yang diduga pernah menghuni klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal tersebut diungkap Syafrida saat menjelaskan hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Keempat napi tersebut yakni Ahmad Albani dan Hasan Tjhie, terpidana kasus korupsi penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Kemudian Jimmy Masrin, terpidana kasus kredit fiktif, serta Indra Kesuma atau yang dikenal sebagai Indra Kenz, terpidana kasus investasi bodong.

"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irjen (Rudi Setiawan (Irjen Imipas) dan itu memang napi koruptor yang menggunakan," kata Syafrida saat ditemui usai acara Serah Terima Tugas

Ombudsman di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Rudi Setiawan membenarkan Jimmy Masrin pernah menempati salah satu rumah yang berada di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Dan yang terlihat di dalam kameranya (Ombudsman) itu adalah Pak Jimmy Masrin sendiri," ungkap Rudi Setiawan.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan dugaan keberadaan klaster hunian mewah di dalam kawasan lapas.

Saat memasuki salah satu bangunan yang diduga masuk dalam klaster mewah tersebut, petugas Ombudsman menemukan bingkai foto milik Jimmy Masrin. Sosok Jimmy Masrin juga terlihat dalam rekaman video sidak Ombudsman saat berada di dalam hunian tersebut

NASIONAL

Patrialis Akbar: Sengketa Pilpres 2024 Sudah Kedaluwarsa

Oleh Redaksi · 5 Okt, 09.53 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap akhir penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Merespons hal tersebut, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menilai, perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 yang baru diajukan pada 2026 semestinya tidak dapat diterima.

Menurutnya, sengketa hasil pemilu memiliki batas waktu pengajuan yang ketat setelah hasil diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Hemat saya, semestinya ini sudah kedaluwarsa," kata Patrialis dalam keterangannya yang diterima Minggu, 4 Oktober 2026.

Karena itu, Patrialis mempertanyakan alasan sengketa hasil Pilpres 2024 baru diajukan lebih dari dua tahun setelah proses pemilu selesai.

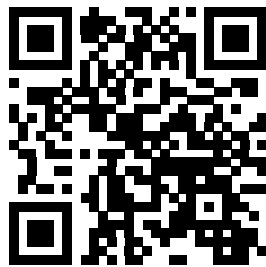
"Kalau hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hari ini baru diajukan, itu kan persoalannya sangat tanda tanya bagi kita," kata Patrialis.

Sebaliknya, kata Patrialis, bila terdapat persoalan lain yang ingin diuji, mekanisme hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan objek perkaranya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sengketa Ijazah Gibran di MK, Mantan Hakim Patrialis Akbar Pertanyakan Legal Standing Pemohon

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.46 WIB



BANDA ACEH – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres terkait gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir di MK.

Menurut Patrialis, dalam praktik sengketa hasil Pilpres, pihak yang mengajukan permohonan pada dasarnya adalah pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan.

“Kalau sengketa Pilpres, yang mengajukan itu adalah pasangan calon. Sekarang, yang mengajukan ini pasangan calon apa bukan?” kata Patrialis dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2026).

Dia juga menyoroti kedudukan para pihak lain dalam sengketa

Pilpres yang menurutnya terkait langsung dengan peserta pemilu. “Oleh karena itu, pihak-pihaknya pun menurut saya tidak masuk kualifikasi,” ujarnya.

Patrialis menegaskan pandangannya tersebut bukan ditujukan kepada pribadi para pemohon, melainkan pada konstruksi hukum sengketa hasil pemilu.

“Sekali lagi, saya hormati tokoh-tokoh bangsa yang ada di sana. Tapi kita bicara sistem, bicara hukum, bicara negara,” katanya.

Selain persoalan kedudukan hukum para pemohon, Patrialis menilai sebagian materi dalam posita maupun petitum perkara juga menyangkut kewenangan lembaga lain.

“Banyak kewenangan dari lembaga lain yang bisa mengatasi masalah-masalah itu. Bahkan menurut saya sebagian itu tidak

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Karena itu, Patrialis meminta agar perkara tersebut dilihat dengan tetap berpegang pada pembagian kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. “MK itu juga ada batasannya,” ucapnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap hakim konstitusi mengabulkan petitum yang meminta Gibran didiskualifikasi.

“Insya Allah harapannya dari kami permohonannya dikabulkan, Gibran bisa didiskualifikasi,” ujar Denny Indrayana yang juga men-

jadi pemohon perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Sabtu (3/10/2026).

Denny menilai permohonan tersebut perlu dikabulkan karena, menurut klaimnya, persidangan PHPU telah membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah pendidikan SMA. Dia juga mengeklaim persidangan menunjukkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan aturan yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi putra Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Dia berharap putusan MK dapat menjadi solusi atas persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Menurutnya, apa pun putusan yang dijatuhkan harus dihormati dan ditaati semua pihak

NASIONAL

Jabatan Ketua Fraksi Golkar Belum Diputuskan Usai Sarmuji dan Bamsoet Hengkang

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.34 WIB



BANDA ACEH -Partai Golkar segera memproses pergantian antarwaktu (PAW) Sarmuji dan Bambang Soesatyo yang meninggalkan kursi DPR setelah mendapat jabatan baru di pemerintahan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat terkait proses PAW tersebut.

“Ini dalam waktu dekat ini kita akan sampaikan surat, ya. Dan kemudian nanti selanjutnya, ya mengikuti proses yang ada aja,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin, 5 Oktober 2026.

Sarmuji kini menjabat Menteri Perindustrian, sementara Bambang Soesatyo menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Keduanya tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPR dengan jabatan baru tersebut.

“Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kan tidak boleh rangkap jabatan, ya, antara anggota DPR dengan

jabatan-jabatan yang sekarang mereka amanah,” ujar Doli.

Untuk penggantinya, Golkar akan mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya dari calon anggota legislatif pada daerah pemilihan masing-masing.

“Yang menggantikan adalah nama-nama yang kemarin memperoleh suara terbanyak berikutnya dari anggota-anggota DPR yang terpilih,” kata Doli.

Di sisi lain, pergantian Sarmuji tidak hanya menyangkut kursi DPR. Posisi Ketua Fraksi Golkar DPR yang sebelumnya dipegang Sarmuji juga belum ditentukan.

Doli mengatakan, pembahasan mengenai pengganti Sarmuji sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR belum dilakukan. Keputusan tersebut masih menunggu DPP dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Belum. Saya kira nanti menunggu keputusan DPP, keputusan Ketua Umum lah. Nah, kita tunggu aja,” tandasnya

NASIONAL

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Oleh Redaksi · 5 Okt, 09.49 WIB



BANDA ACEH -Keputusan Rocky Gerung alias RG menerima posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menuai sorotan publik. Pasalnya, Rocky selama ini dikenal sebagai salah satu figur yang kritis terhadap pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Adi Prayitno mengingatkan agar sikap kritis tidak serta-merta membuat seseorang bersikap anti terhadap kekuasaan.

“Jangan anti kekuasaan. Karena ‘kita’ tak pernah tahu, jangan-jangan di suatu waktu, ‘kita’ akan jadi bagian di dalamnya,” ujar Adi, Senin, 5 Oktober 2026.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia tersebut, sikap terhadap kekuasaan dapat berubah seiring dengan situasi dan posisi seseorang.

“Atau jangan-jangan, yang sekarang anti itu, karena belum dapat kekuasaan aja,” sambungnya.

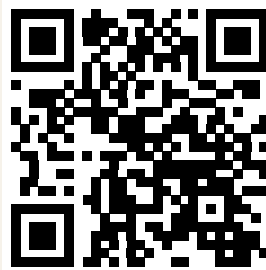
Rocky Gerung sendiri kini menjadi bagian dari Wantimpres setelah menerima posisi tersebut dan dilantik bersama anggota lainnya.

Masuknya Rocky ke lingkaran pemerintahan menjadi perhatian, bahkan sampai “dirujuk” netizen, lantaran selama ini ia dikenal vokal menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Suyudi Ario Seto Harus Tegas terhadap Dugaan Pelanggaran Hukum Jokowi

Oleh Redaksi · 5 Okt, 07.02 WIB



BANDA ACEH - Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto diharapkan tidak berhenti pada rekonstruksi organisasi, penyegaran personel, maupun rotasi jabatan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, publik menantikan langkah konkret berupa penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dikaitkan dengan pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Amir, perubahan kepemimpinan di tubuh Polri harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan Politik.

“Menunggu ketegasan Suyudi Ario Seto atas segala dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan wewenang yang selama ini dikaitkan dengan mantan Presiden Jokowi,” kata Amir, dikutip Senin 5 Oktober 2026.

Ia menilai, keberanian institusi kepolisian dalam menindaklanjuti laporan dan bukti dugaan pelanggaran hukum akan menjadi tolok ukur penting bagi publik dalam menilai arah kepemimpinan Kapolri yang baru.

“Rakyat mendukung penuh jika Kapolri memeriksa Jokowi sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” kata Amir.

Dari perspektif intelijen dan geopolitik, Amir memandang, pergantian Kapolri bukan hanya persoalan administratif di lingkungan

kepolisian, melainkan juga bagian dari dinamika konsolidasi kekuasaan dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam analisisnya, stabilitas nasional tidak cukup dibangun melalui pendekatan keamanan dan pengendalian situasi. Stabilitas juga membutuhkan legitimasi publik yang lahir dari penegakan hukum secara konsisten.

Ketika masyarakat mempertanyakan penanganan suatu perkara, negara perlu memberikan jawaban melalui mekanisme hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, menurut Amir, Kapolri Suyudi perlu memastikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat maupun mantan pejabat negara ditangani berdasarkan fakta, bukan pertimbangan politik.

“Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat memunculkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ini yang harus dihindari oleh kepemimpinan Polri yang baru,” kata Amir.

Amir menambahkan, dalam perspektif intelijen, persepsi ketidakadilan yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi persoalan serius apabila tidak direspons melalui kebijakan yang tepat.

Kepercayaan publik merupakan salah satu modal penting bagi negara untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan keamanan nasional.

“Kapolri baru harus menunjukkan bahwa Polri merupakan institusi penegak hukum, bukan alat untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu tertentu,” pungkas Amir.

NASIONAL

Roy Suryo Sebut 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu, Jaksa: Harus Dibuktikan di Persidangan

Oleh Redaksi · 5 Okt, 13.22 WIB



BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyinggung pernyataan terdakwa Roy Suryo yang menyebut 99,9 persen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) palsu. Bagi JPU, pernyataan tersebut harus dibuktikan melalui persidangan.

Hal itu disampaikan JPU ketika membacakan tanggapan atas perlawanan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (5/10/2026). JPU menilai terdakwa tak memiliki dasar pembuktian.

“Terhadap dalil perlawanan mengenai perbedaan antara pernyataan 99,9 persen palsu dengan 100 persen palsu, kami penuntut umum berpendapat bahwa tim advokat terdakwa telah menarik kesimpulan yang belum mempunyai dasar pembuktian, ketika menyatakan angka 99,9 persen palsu berarti terdapat 0,1 persen bagian yang asli, valid, atau benar,” kata JPU.

Menurut JPU, sebelum menarik kesimpulan mengenai makna angka tersebut, semestinya terdakwa harus lebih dulu menjelaskan pengukurannya.

“Bagaimana metode pengukurannya, serta apakah persentase tersebut dimaksudkan sebagai

tingkat keyakinan terhadap suatu kesimpulan, proporsi bagian dokumen, atau bentuk penegasan dalam suatu pernyataan. Persentase tingkat keyakinan terhadap suatu kesimpulan tidak dapat langsung dipersamakan dengan persentase bagian fisik atau digital suatu dokumen,” ucap JPU.

JPU menegaskan, pihaknya berkewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Roy Suryo, bukan sekadar membuktikan pembagian persentase dokumen yang ditafsirkan Roy Suryo.

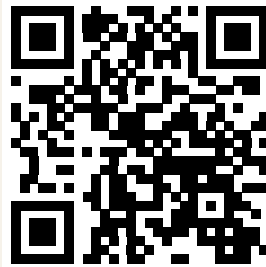
“Bahwa terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi dasar bagi penjatuhannya sanksi atau putusan bebas,” katanya.

JPU melanjutkan, dalil perlawanan kubu Roy Suryo mengenai bukti fisik, bukti elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, metode ELA, hingga makna pernyataan 99,9 persen palsu masih harus diuji dalam proses pembuktian di persidangan. Karena itu, hal tersebut dinilai belum cukup untuk menyatakan surat dakwaan JPU obskur libel atau tidak cermat/tidak lengkap

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

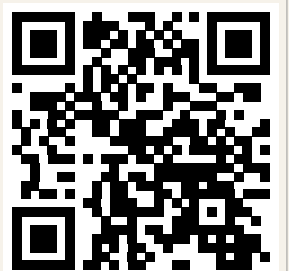
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto Dipecat dari ASN, 16 Pegawai Disanksi

Oleh Redaksi · 5 Okt, 19.43 WIB



BANDA ACEH - - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) memberhentikan Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dari ASN, dan menjatuhkan sanksi kepada 16 pegawai lainnya setelah hasil investigasi Ombudsman RI menemukan hunian berfasilitas mewah. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan, selain Wisnu, pihaknya juga memeriksa dan menjatuhkan sanksi tegas kepada Kalapas Cibinong sebelumnya Usman Madjid. "Iya kalapas lama dan kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," kata Rudi Setiawan

saat dikonfirmasi ulang sesuai konferensi pers di Kantor Impipas, Senin. Menurutnya, Wisnu termasuk dalam 17 pegawai yang disanksi tersebut, dan diberhentikan dari jabatan dan statusnya sebagai ASN. "Iya masuk dalam 17 yang tadi, diberhentikan dari ASN," katanya menegaskan. Hasil investigasi Irjen Kemenimipas menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dan pelanggaran beberapa SOPm. "Untuk 17 pegawai yang mendapat hukuman disiplin," ujarnya.

Dia memerinci, 1 pegawai diberhentikan, lima dijatui disiplin berat, hukuman disiplin sedang 11 orang. "Jadi semuanya diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai tadi peraturan yang ada," ujarnya. Rudi menekankan, sanksi disiplin ini dijatuhkan sesuai aturan di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Imigrasi Nomor 9.PT.01.01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

NASIONAL

Kasus Gibran Momentum Tegakkan Etika, Moral dan Integritas

Oleh Redaksi · 5 Okt, 07.16 WIB



BANDA ACEH - Persoalan Gibran Rakabuming Raka bukan cuma soal Wapres bermodalkan surat keterangan alias Suket penyetaraan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang tidak punya ijazah SMA. Masalah Gibran bukan hanya soal tuntutan pembatalan status Cawapres sekaligus tuntutan agar MPR memakzulkan dan mengganti dengan Wapres yang lain. Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin mengatakan, persoalan Gibran esensinya adalah persoalan moral,

etika dan integritas dunia pendidikan. "Apakah bermoral, tak lulus SMA bisa menjadi Wapres? Apakah punya etika, hanya bermodal Suket menjadi Wapres?" kata Khozinudin, dikutip Senin 5 Oktober 2026. Lantas di mana integritas dunia pendidikan yang memiliki ratusan ribu sekolah jenjang pendidikan setara SMA dan meluluskan jutaan, bahkan ratusan juta lulusan SMA dan yang setara SMA, jika dikangangi dengan Suket yang kelasnya hanya setara kursus 6 bulan? "Jadi, ini soal insentif pendidikan. Insentif pendidikan, itu akan

terap ada sepanjang nilai etika, moral dan integritas pendidikan tetap terjaga," kata Khozinudin. Tanpa hal itu, kata Khozinudin, publik akan mendakwa dunia pendidikan dan mempertanyakan, untuk apa menempuh jenjang pendidikan resmi dan bersusah payah sekolah SMA, jika faktanya hanya dengan Suket saja Gibran bisa menjadi Wapres. "Nilai-nilai etika, moral dan integritas bukan hanya penting di dunia pendidikan. Melainkan juga di dunia Politik, akademis, usaha, lingkungan kerja, hingga dunia aktivis," kata Khozinudin.

NASIONAL

Letjen Lucky Avianto Komandan Upacara HUT ke-81 TNI, Jenderal Kopassus Pemburu KKB

Oleh Redaksi · 5 Okt, 10.08 WIB



BANDA ACEH - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI digelar di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen Lucky Avianto menjadi komandan upacara. Tampak, Letjen Lucky berdiri tegak dengan seragam lengkap beserta baret hitam, memimpin barisan para prajurit.

Letjen Lucky Avianto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari satuan Kopassus. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996 dan peraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik. Lucky juga tercatat pernah menjadi lulusan terbaik Seskoad 2011 dan Sesko TNI 2019. Sebelum menjabat Pangkogabwilhan III, Lucky dipercaya sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora. Dia juga pernah memimpin Pangkoops Habema dalam penguasaan di Papua, menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di tingkat internasional,

dia pernah menjalankan tugas sebagai pengamat militer di Kongo dan memimpin batalyon mekanis TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Lucky resmi menjadi Pangkogabwilhan III pada 26 Maret 2026, menggantikan Letjen Bambang Trisnohadi. Bersamaan dengan jabatan tersebut, pangkatnya dinaikkan dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal (bintang tiga). Wilayah kerja Kogabwilhan III mencakup kawasan pertahanan strategis di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua

NASIONAL

Dari Sidang Mahkamah Konstitusi Terungkap Gibran Tidak Tamat SLTA

Oleh Redaksi · 5 Okt, 06.58 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memasuki tahap akhir penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada 2024. Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Nurmadi H. Sumarta menilai MK seperti itu setuju dengan petitum permohonan Denny Indrayana cs bahwa apa yang tidak sah sejak awal, tidak menjadi sah dengan berlalunya waktu.

"Dari sidang terungkap Gibran tidak memiliki ijazah SLTA sederajat," kata Nurmadi, dikutip Senin 5 Oktober 2026. Bahkan, kata Nurmadi, untuk terbitnya surat keterangan (Suket) penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pun dikeluarkan super kilat. "Suket cuma berdasar Certificate of attendance tanpa ijazah. Artinya, bahkan kursus pun tidak lulus," kata Nurmadi. Dari persidangan MK, kata Nurmadi, terjadi kerancuan jenjang pendidikan Gibran level SMA. Tamat di Orchid Park Secondary

School setara kelas 1 SMA lalu menempuh jalur pathway di UTS Insearh (semacam bimbingan belajar menuju perguruan tinggi dan kursus bahasa) tidak sampai tamat, yang dinilai tak setara SMK. Terlebih, kata Nurmadi, Kementerian Dikdasmen mengeluarkan dokumen setara tanpa basis ijazah/sertifikat UTS Insearh namun daftar kehadiran. "Jadi dapat disimpulkan Gibran tidak tamat SLTA sederajat dan tidak memiliki ijazah yang dipersyaratkan untuk Capres Cawapres," pungkas Nurmadi.

ACEH

Muhammad Saman Daftar Bakal Calon Ketua PWI Aceh 2026-2031

Oleh Redaksi · 5 Okt, 20.55 WIB



Muhammad Saman mendaftar dan mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua PWI Aceh yang diserahkan Pokja Verifikasi Calon Imran Joni didampingi Ketua DKP PWI Aceh, HT Anwar Ibrahim. FOTO/Dok. Istimewa.

BANDA ACEH - Muhammad Saman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026-2031 pada hari pertama pembukaan pendaftaran, Senin (5/10/2026).

Muhammad Saman datang ke Sekretariat Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengambil formulir sekaligus mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua organisasi wartawan tersebut.

Pada waktu yang sama, Tarmilin Usman juga mengambil formulir dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh periode 2026-2031.

Kedatangan kedua kandidat tersebut disambut Sekretaris Steering Committee (SC) Konferprov PWI Aceh, Iranda Novandi, bersama Imran Joni selaku Pokja Verifikasi Calon dan Ketua Organizing Committee (OC), Nazar Ahadi. Turut mendampingi proses pendaftaran tersebut Ketua DKP PWI Aceh, HT Anwar Ibrahim.

Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Aceh dan Ketua DKP PWI Aceh sendiri resmi dibuka mulai 5 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Keputusan tersebut ditetapkan setelah SC Konferprov PWI Aceh menggelar rapat finalisasi di Kantor PWI Aceh pada Jumat (2/10/2026).

Muhammad Saman bukan nama baru dalam struktur organisasi PWI Aceh. Ia tercatat pernah menjabat Wakil Sekretaris PWI Aceh periode 2015-2020 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Aceh periode 2021-2026.

Pengalaman tersebut membuat Saman telah terlibat dalam dinamika organisasi PWI Aceh selama lebih dari satu periode kepengurusan.

Dalam perjalanan jurnalistiknya, Muhammad Saman sebagai pemegang kompetensi Wartawan Utama Dewan Pers merupakan wartawan Harian Analisa dan saat ini sebagai Pemimpin Redaksi media online Infoaceh.net dan Harian Aceh.

Sebelumnya, Saman juga dipercaya memimpin Forum Pemred SMSI Aceh dan Wakil Ketua Bidang Kerja Sama SMSI Aceh periode 2026-2030. Ia juga merupakan mantan Sekjen Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI).

Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari pengalaman organisasi dan jurnalistik yang dibawa Saman ketika memasuki kontestasi pemilihan Ketua PWI Aceh periode mendatang.

Proses penjaringan bakal calon Ketua PWI Aceh dan Ketua DKP PWI Aceh periode 2026-2031 berlangsung selama hampir tiga pekan, yakni mulai 5 Oktober hingga 24 Oktober 2026.

Steering Committee Konferprov PWI Aceh sebelumnya menjelaskan, para bakal calon yang mendaftar harus memenuhi sejumlah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) dan Peraturan Organisasi (PO) PWI.

Salah satu persyaratan penting adalah dukungan awal sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah

Daftar Pemilih Tetap (DPT) peserta Konferprov.

Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diberitakan panitia, jumlah pemilih berada di kisaran 320 orang. Dengan demikian, ambang dukungan minimal yang disebut panitia adalah 32 anggota biasa PWI Aceh.

Surat dukungan tersebut harus ditandatangani langsung oleh anggota yang memberikan dukungan dan dilengkapi fotokopi Kartu PWI biasa atau kartu biru.

Selain persyaratan dukungan, bakal calon juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi lainnya. Di antaranya sertifikat dan kartu kompetensi utama, surat keterangan tidak terlibat atau aktif sebagai pengurus partai politik, daftar riwayat hidup, pasfoto, surat keterangan dari perusahaan pers tempat bekerja, serta ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Buka EXPOSE III Ruhul Qurani, Tarmizi Dorong Kreativitas Pelajar

Oleh Aceh Barat · 5 Okt, 19.51 WIB



BUPATI ACEH BARAT BUKA EXPOSE III The Legacy of Rencong di Dayah Ruhul Qurani, FOTO/ist

MEULABOH — Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM membuka kegiatan EXPOSE III bertema “The Legacy of Rencong” di Kompleks Dayah Rurul Qurani, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Senin (5/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Sejumlah karya peserta turut dipamerkan, di antaranya tongkat untuk penyandang tunanetra.

Tarmizi mengapresiasi Dayah Rurul Qurani yang telah menyediakan ruang bagi para peserta untuk mengembangkan bakat dan kreativitas sebagai bekal masa depan.

“Kami sangat mengapresiasi Dayah Rurul Qurani yang telah memberikan wadah atau panggung kepada para peserta sehingga mereka bisa berkreaitivitas sebagai modal untuk ke depannya,” ujar Tarmizi.

EXPOSE III kali ini diikuti peserta dari empat kabupaten di wilayah barat-selatan Aceh. Tarmizi berharap kegiatan tersebut dapat berkembang dan ke depan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Aceh, bahkan peserta dari luar Aceh.

Menurutnya, Pemkab Aceh Barat akan terus mendorong penguatan pendidikan, termasuk pembenahan tata kelola pendidikan dan penguatan karakter peserta didik.

“Berbicara kemajuan daerah adalah pendidikan, maka pendidikan menjadi fokus kita,” katanya.

Tarmizi juga berharap sekolah dan dayah dapat menjadi lingkungan yang membentuk generasi muda dengan ilmu, keterampilan, akhlak, serta kepercayaan diri.

Ia menilai dayah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperdalam ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang bagi santri dan pelajar untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan berbagai potensi yang dimiliki.

“Kami berharap EXPOSE ini terus berkembang untuk menunjukkan bakat, kreativitas dan kemampuan para siswa. Kegiatan ini juga dapat mempertemukan sekolah, dayah, guru dan pembina dalam suasana positif untuk membangun,” ujarnya.

Tarmizi turut mengapresiasi keluarga besar Dayah Rurul Qurani yang selama ini dinilai aktif membawa nama baik Aceh Barat dalam berbagai kegiatan di luar daerah.

Ia menegaskan Pemkab Aceh Barat akan terus mendorong terciptanya ruang-ruang positif bagi tumbuhnya potensi generasi muda.

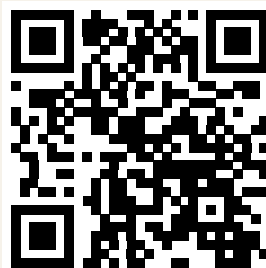
Kepada seluruh peserta, Tarmizi berpesan agar mengikuti EXPOSE III dengan semangat dan menjunjung tinggi sportivitas.[]

Editor : Biro Meulaboh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Wagub Dek Fadh Tinjau Sejumlah Infrastruktur dan Kondisi Sungai di Bireuen-Aceh Utara

Oleh Redaksi · 5 Okt, 19.23 WIB



BANDA ACEH, BIREUEN – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh), melakukan peninjauan sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (5/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari berbagai pihak serta masyarakat setempat mengenai kondisi sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, Wagub Aceh turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus mendengarkan berbagai masukan terkait kebutuhan penanganan di masing-masing lokasi.

Sebelum melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara, Wagub Aceh terlebih dahulu mengunjungi salah satu lokasi di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kunjungan tersebut, Dek Fadh didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Kunjungan itu juga merupakan bagian

dari rangkaian peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah.

Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Dalam rangkaian kunjungan selanjutnya, Wagub Aceh meninjau Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari lokasi tersebut, Wagub kemudian melanjutkan peninjauan ke Krueng Simpoh, Kabupaten Bireuen, untuk melihat secara langsung kondisi kawasan dan aliran sungai serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Selanjutnya, Wagub Aceh bergerak menuju Aceh Utara untuk meninjau Sungai Sawang. Di lokasi ini, Wagub melihat langsung kondisi sungai dan kawasan sekitarnya bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Rangkaian peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang, Aceh Utara. Wagub melihat langsung kondisi pekerjaan dan kawasan tebing sungai, sekaligus berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai penanganan dan kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut.

Turut mendampingi Wagub dalam rangkaian peninjauan tersebut Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh, Ruthmilla Devi, Kepala UPTD V Pengairan Aceh, Bambang Yusri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA Bobby Syahputra, SE, M.Si, Karo Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta jajaran pemerintah daerah, jajaran teknis dan pihak balai yang membidangi lokasi yang dikunjungi Wagub Aceh.

Dek Fadh mengatakan, peninjauan langsung ke sejumlah lokasi tersebut dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan dan memastikan berbagai persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, laporan dari masyarakat dan berbagai pihak menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.

“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.

Pemerintah Aceh, kata Dek Fadh, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis serta pihak balai yang membidangi masing-masing lokasi, sehingga setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kondisi lapangan, dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Tinjau D.I. Seunong, Wagub Aceh Dorong Perbaikan Segera

Oleh Redaksi · 5 Okt, 14.17 WIB



BANDA ACEH, PIDIE JAYA — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, meninjau langsung kondisi Daerah Irigasi (D.I.) Seunong di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, Senin (5/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi irigasi sekaligus merespons keluhan masyarakat terkait kerusakan yang belum mendapat penanganan.

Dalam kunjungan tersebut, Dek Fadh didampingi Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Asisten II Pidie Jaya, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Rombongan juga meninjau kawasan Krueng Meureudu yang menjadi bagian dari sistem irigasi tersebut.

Peninjauan dilakukan setelah masyarakat menghubungi Dek Fadh dan menyampaikan keluhan mengenai kondisi D.I. Seunong. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Dek Fadh turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi irigasi dan mendengarkan kebutuhan masyarakat.

Di lokasi, masyarakat menyampaikan kerusakan D.I. Seunong telah mengganggu aliran air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Agar aliran air tetap berjalan, masyarakat selama ini melakukan gotong royong secara swadaya untuk menjaga fungsi irigasi.

Menanggapi kondisi tersebut, Dek Fadh mengatakan pemerintah akan segera mendorong penanganan agar kerusakan irigasi tidak terus berdampak terhadap masyarakat. Ia juga telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mendorong penganggaran revitalisasi D.I. Seunong.

“Kita sudah melihat langsung kondisinya dan mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Saya sudah berkoordinasi dengan BWS agar penanganannya dapat segera dianggarkan sehingga perbaikan bisa dilakukan,” ujarnya.

Selain meninjau D.I. Seunong, Dek Fadh juga melihat penanganan di Krueng Meureudu yang sebelumnya dilakukan melalui pemasangan batu gajah. Pekerjaan tersebut hingga kini masih berproses sesuai dengan pelaksanaan anggaran pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, Dek Fadh menegaskan Pemerintah Aceh akan terus mengawal koordinasi dengan BWS agar penanganan D.I. Seunong dapat segera direalisasikan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memulihkan fungsi irigasi dan memastikan kebutuhan air masyarakat kembali terpenuhi, khususnya untuk mendukung aktivitas pertanian di Kecamatan Meurah Dua. []

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

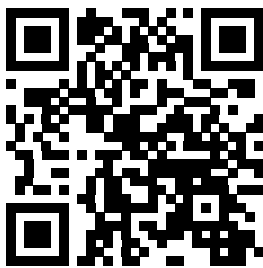
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Hari Pertama Pendaftaran, Muhammad Saman Resmi Masuk Bursa Ketua PWI Aceh 2026-2031

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.07 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Muhammad Saman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026-2031 pada hari pertama pembukaan pendaftaran, Senin (5/10/2026).

Muhammad Saman datang ke Sekretariat Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengambil formulir sekaligus mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua organisasi wartawan tersebut.

Pada waktu yang sama, Tarmilin Usman juga mengambil formulir dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh periode 2026-2031.

Kedatangan kedua kandidat tersebut disambut Sekretaris Steering Committee (SC) Konferprov PWI Aceh, Iranda Novandi, bersama Imran Joni selaku Pokja Verifikasi Calon dan Ketua Organizing Committee (OC), Nazar Ahadi. Turut mendampingi proses pen-

daftaran tersebut Ketua DKP PWI Aceh, HT Anwar Ibrahim.

Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Aceh dan Ketua DKP PWI Aceh sendiri resmi dibuka mulai 5 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Keputusan tersebut ditetapkan setelah SC Konferprov PWI Aceh menggelar rapat finalisasi di Kantor PWI Aceh pada Jumat (2/10/2026).

Muhammad Saman bukan nama baru dalam struktur organisasi PWI Aceh. Ia tercatat pernah menjabat Wakil Sekretaris PWI Aceh periode 2015-2020 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Aceh periode 2021-2026.

Pengalaman tersebut membuat Saman telah terlibat dalam dinamika organisasi PWI Aceh selama lebih dari satu periode kepengurusan.

Dalam perjalanan jurnalistik-nya, Muhammad Saman sebagai pemegang kompetensi Wartawan Utama Dewan Pers merupakan wartawan Harian Analisa dan saat ini sebagai Pemimpin Redaksi

media online Infoaceh.net dan Harian Aceh.

Sebelumnya, Saman juga dipercaya memimpin Forum Pemred SMSI Aceh dan Wakil Ketua Bidang Kerja Sama SMSI Aceh periode 2026-2030. Ia juga merupakan mantan Sekjen Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI).

Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari pengalaman organisasi dan jurnalistik yang dibawa Saman ketika memasuki kontestasi pemilihan Ketua PWI Aceh periode mendatang.

Proses penjangkaran bakal calon Ketua PWI Aceh dan Ketua DKP periode 2026-2031 berlangsung selama hampir tiga pekan, yakni mulai 5 Oktober hingga 24 Oktober 2026.

Steering Committee Konferprov PWI Aceh sebelumnya menjelaskan, para bakal calon yang mendaftar harus memenuhi sejumlah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) dan Peraturan Organisasi (PO) PWI.

Salah satu persyaratan penting adalah dukungan awal sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) peserta Konferprov.

Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diberitakan panitia, jumlah pemilih berada di kisaran 320 orang. Dengan demikian, ambang dukungan minimal yang disebut panitia adalah 32 anggota biasa PWI Aceh.

Surat dukungan tersebut harus ditandatangani langsung oleh anggota yang memberikan dukungan dan dilengkapi fotokopi Kartu PWI biasa atau kartu biru.

Selain persyaratan dukungan, bakal calon juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi lainnya. Di antaranya sertifikat dan kartu kompetensi utama, surat keterangan tidak terlibat atau aktif sebagai pengurus partai politik, daftar riwayat hidup, pasfoto, surat keterangan dari perusahaan pers tempat ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Aceh Barat Perkuat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Oleh Aceh Barat · 5 Okt, 15.53 WIB



Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida Aceh Barat, Senin

MEULABOH — Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida Aceh Barat, Senin (5/10/2026).

Rakor tersebut turut dihadiri Sekda Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Wistha Nowar, serta Kepala Bapperida Abdul Wahab.

Said mengatakan, Rakor dan Desk TKPK 2026 menjadi momentum penting untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh Barat.

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja bersama yang terpadu, tepat sasaran, berbasis data, serta berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada tiga hal, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” kata Said.

Ia menyebutkan, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2026

mencapai 12,34 persen. Sementara data rilis 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh Barat sebesar 15,50 persen.

Said menegaskan, angka tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan memberikan dampak nyata.

“Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu agar intervensi pemerintah benar-benar menysar keluarga dan wilayah yang membutuhkan.

Intervensi tersebut, lanjut Said, harus mencakup berbagai sektor, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi hingga perluasan kesempatan kerja.

Said berharap Rakor TKPK menghasilkan gambaran capaian program, kesepakatan langkah percepatan, serta tindak lanjut yang terukur hingga akhir 2026.

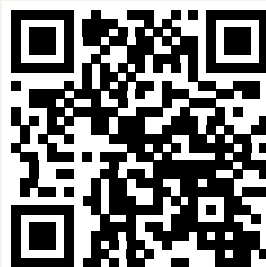
“Pada akhirnya, keberhasilan program diukur dari perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.[]

Editor: Biro Meulaboh

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

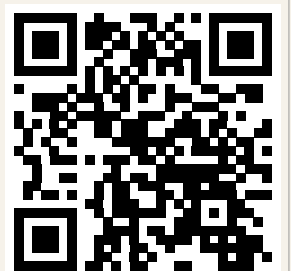
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

HUT ke-81 TNI, Kodam IM Tegaskan Komitmen Bersama Rakyat

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.48 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H., mewakili Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Blang Padang, Senin (5/10/2026).

Upacara tersebut mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., yang dibacakan Kasdam IM, ditegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga

melalui pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta berpedoman pada hukum.

Panglima TNI juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan, profesionalisme, serta kemampuan prajurit dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Nilai PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, harus menjadi budaya pengabdian seluruh prajurit dan ASN TNI.

Peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara TNI dan rakyat dalam men-

jaga ketahanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan syukuran, pemberian santunan kepada veteran dan warakawuri, serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan dalam rangka HUT ke-81 TNI.

Keluarga besar Kodam Iskandar Muda meneguhkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat profesionalisme prajurit, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.[]

ACEH

Plt Sekda Aceh Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Lapangan Blang Padang

Oleh Redaksi · 5 Okt, 12.47 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufiq, ST., M.Si., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di Lapangan Blang Padang, Senin (5/10/2026).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Dwi Sasongko selaku inspektur upacara tersebut berlangsung khidmat dan sederhana.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan kali ini tidak

dimeriahkan dengan defile pasukan, pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista), maupun atraksi personel.

Kasdam IM Brigjen TNI Dwi Sasongko menjelaskan bahwa kesederhanaan prosesi upacara tahun ini merupakan bentuk penyesuaian atas instruksi pimpinan.

Hal ini disebabkan fokus utama prajurit yang saat ini masih dialokasikan untuk misi kemanusiaan dan penanganan bencana di berbagai wilayah di Aceh.

Kasdam mengatakan, personel gabungan dari jajaran Kodam

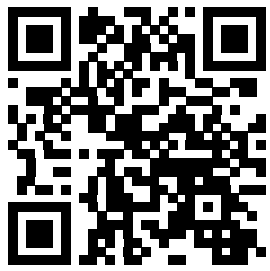
Iskandar Muda, TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) hingga kini terus dikerahkan di lapangan untuk membantu proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di daerah-daerah terdampak.

Kehadiran Plt. Sekda Aceh dalam agenda ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran TNI, termasuk dalam mendukung upaya penanggulangan bencana dan pemulihan daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

4 BERITA

OPINI

Kebohongan itu Sudah Terbuka, MK Mau Apa Lagi?

Oleh Redaksi · 5 Okt, 07.12 WIB



Oleh: Geisz Chalifah((Pegiat Demokrasi))

DA masa di mana narasi publik bisa diteuk-teuk oleh kekuasaan.

Ada waktu di mana retorika usang para relawan dan barisan pembela kekuasaan masih laku di pasaran. Fakta bisa dipelintir, pertanyaan bisa dialihkan, dan persoalan bisa ditutup dengan kalimat sederhana: semuanya sudah sesuai prosedur.

Tetapi ada satu tempat di mana semua itu seharusnya berhenti.

Ruang sidang.

Dan kali ini, ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) justru menjadi panggung ketika satu per satu topeng itu mulai terlepas.

Fakta-fakta hukum tidak lagi berbisik.

Mereka berteriak.

Ketika mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan percaya diri menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 muncul karena adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, publik mendapatkan sebuah penjelasan.¹

Masalahnya, penjelasan itu kemudian berhadapan dengan

keterangan lembaga yang disebut sebagai sumber masukan tersebut.

Dan di situlah masalahnya.

Sebab ketika sebuah keterangan di ruang sidang bertabrakan dengan keterangan resmi dari lembaga yang disebut sebagai sumbernya, maka publik berhak bertanya: Siapa sebenarnya yang mengusulkan pasal itu?

Dari mana datangnya?

Kapan dibahas?

Di forum apa?

Siapa yang memasukkannya?

Dan mengapa ketentuan yang begitu menentukan bagi syarat pencalonan itu justru meninggalkan persoalan dalam jejak pembentukannya?

Pasal 18 ayat (3) itu bukan pasal sembarangan. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian terhadap kewajiban menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon tertentu yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.¹

Dan yang membuat persoalan semakin serius, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sendiri mem-

pertanyakan penyempurnaan PKPU tersebut dan mengingatkan bahwa ketentuan mengenai pengecualian itu sebelumnya tidak pernah ada.¹

Jadi, ini bukan sekadar soal sebuah kalimat dalam peraturan.

Ini soal bagaimana sebuah norma lahir, siapa yang mengusulkannya, dan mengapa norma tersebut tiba-tiba menjadi sangat penting dalam pencalonan Pilpres 2024.

Kalau penjelasan tentang asal-usulnya ternyata tidak konsisten, maka tidak perlu menjadi ahli hukum untuk memahami bahwa ada persoalan yang harus dibongkar.

Dan ketika persoalan itu dibongkar di depan hakim, kebohongan akhirnya punya masalah terbesar: fakta tidak bisa diajak berse-kongkol.

Pasal Siluman dan Jalan yang Dibukakan

Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memperkenalkan pengecualian yang sebelumnya tidak ditemukan dalam sejumlah aturan pemilu yang mengatur per-

syarat pendidikan. Dalam persidangan, pihak Pemohon bahkan menunjukkan bahwa pengecualian semacam itu tidak ditemukan dalam aturan pencalonan Pilpres sebelumnya.²

Artinya, publik tidak sedang memperdebatkan pasal yang sudah puluhan tahun menjadi bagian dari sistem.

Kita sedang berbicara tentang sebuah pengecualian baru.

Dan pengecualian itu muncul tepat ketika pencalonan Gibran menjadi bagian dari Pemilu 2024.

Maka pertanyaannya sederhana:

Untuk siapa sebenarnya pintu itu dibuka?

Kalau jawabannya memang bukan untuk siapa-siapa, silakan buktikan.

Kalau memang lahir dari kebutuhan administratif yang objektif, tunjukkan kebutuhan itu.

Kalau memang berasal dari kementerian, tunjukkan suratnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

OPINI

Gibran Hampir Dipastikan Didiskualifikasi sebagai Wapres

Oleh Redaksi · 5 Okt, 10.14 WIB



Oleh : Sholihin MS (pemerhati sosial dan Politik)Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Suyudi Ario Seto memiliki makna strategis.

Semula Kapolri Listyo Sigit yang nota bene sebagai tangan kanan Jokowi seolah tidak bisa digoyang sama sekali oleh kekuatan apa pun

Polri sebagai lembaga yang menangani masalah hukum, keamanan, dan perlindungan terhadap rakyat selama rezim Jokowi telah berubah menjadi alat kekuasaan Presiden Jokowi. Bahkan setelah Jokowi lengser pun Polri masih dalam kendali Jokowi.

Polri adalah lembaga yang paling strategis dalam kementerian. Oleh karena itu lembaga ini benar-benar telah diintervensi oleh kekuasaan Jokowi dan Genknya serta kepentingan oligarki taipan dan pemerintah China. Sebaliknya, TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan negara dan pelindung rakyat selama rezim Jokowi terus dikebiri dan seolah diampun-tasi kewenangannya.

Walaupun masih terlalu dini untuk bisa menilai arah kebijakan kapolri baru, tapi melihat gebrakan kapolri baru yang memutasi banyak kapolda, perwira tinggi dan mengganti pimpinan bareskrim polri yang pro Jokowi tampaknya bakal ada angin segar. Bahkan diberitakan Kapolri baru sudah menghubungi IB HRS yang akan membuka kembali kasus pembantaian 6 laskar FPI tahun 2019

Penggantian Kapolri tidak terlepas dari konstelasi politik terkini yang mempermasalahkan keabsahan prngangkatan Gobran yang cacat hukum dan cacat moral, yang saat ini sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menerima gugatan antara

lain dari Prog Deny Indrayana untuk segera melengserkan Gibran dari kursi Wapres yang sarat pelanggaran hukum dan cacat prosedur.

Tampak Gibran tidak bisa mengelak lagi atas berbagai pelanggaran baik karena unsur kolusi, msnipulasi, cacat moral.

Paling tidak ada 5 indikator kalau Gibran bakal didiskualifikasi sebagai Wapres :

Pertama, DPR pada akhirnya menyetujui penggantian Kapolri dari Listyo Sigit kepada Suyudi Ario Seto yang semula tidak berani memprosesnya

Kedua, Lystio Sigit yang posisinya sangat kuat sebagai tangan kanan Jokowi pada akhirnya bisa ditumbangkan

Ketiga, Langkah awal Komjen Suyudi yang memutasi banyak kapolda, Pati, dan Kabareskrim yang menangani ijazah Jokowi merupakan sinyal bakal terjadi perubahan konstelasi politik yang cukup signifikan

Keempat, MK yang mulai berani memberi keputusan yang mendukung rakyat dan bersebrangan dengan keinginan Jokowi

Kelima, Suhu politik yang semakin mengerucut yang membongkar berbagai manipulasi hukum dan kepalsuan ijazah Gibran

Jika Gibran bisa dilengserkan, bisa menjadi awal ysng baik untuk mengikis kekuatan dan kedigdayaan Jokowi. Paling tidak, Gibran yang digadang-gadang bakal maju nyapres atau nyaeapres di Pemilu 2029, bisa gagal total dan sekaligus menghancurkan reputasi Jokowi dan PSI.

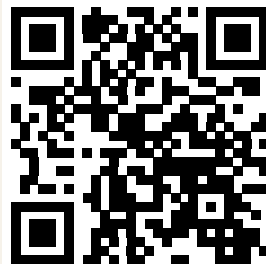
Semoga Presiden Prabowo mampu melawan tekanan dan perlawanan dari kekuatan Jokowi, oligarki Taipan, dan Pemerintah China.

Bandung, 22 Rabiul Akhir 1448

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

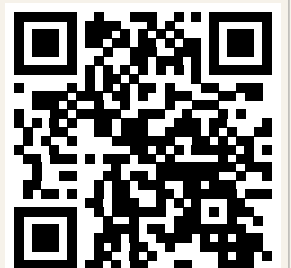
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Kasih Mas Wapres Dilaporkan ke Polisi Usai Listyo Dicapot

Oleh Redaksi · 5 Okt, 07.07 WIB



Oleh: Rosadi Jamani((Mantan Wartawan))

ASIHAN juga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hidupnya belakangan ini seperti orang masuk ring tinju, tetapi wasitnya sedang rapat, penontonnya berte-riak, sementara partai pengusung-nya entah sedang ngopi di mana.

Belum kelar urusan ijazah di Mahkamah Konstitusi (MK), sudah muncul laporan ke Bareskrim. Belum selesai satu pintu, pintu sebelah dibuka.

Pada 1 Oktober 2026, Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Besoknya, 2 Okto-ber, serah terima jabatan berlang-sung. Kapolri baru kemudian menerbitkan telegram mutasi 88 perwira. Salah satunya Irjen Asep Safrudin, sebelumnya Kapolda Kepri, naik menjadi Kabareskrim menggantikan Komjen Syahardi-antono.

Lalu, 3 Oktober. Bruak! Gibran dilaporkan ke Bareskrim.

Pelapornya D. Samsudin dari Aliansi Rakyat Menggugat ber-sama Riyadi alias Regas dari

Pengacara Jawa Bela Umat. Mereka didampingi Ahmad Kho-zinudin dan tim.

Materinya menyangkut dugaan persoalan dokumen pendidikan digunakan Gibran saat pencalonan cawapres 2024, khususnya ketera-ngan bahwa Grade 12 UTS Inse-arch Sydney setara dengan SMK peminatan akuntansi atau keua-ngan. Pihak yang menerbitkan surat tersebut juga dilaporkan, dengan dugaan terkait Pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat.

Namun, laporan itu belum resmi diterima. Di Bareskrim hanya ada petugas piket sehingga pelapor diminta kembali Senin, 5 Oktober.

Jangan buru-buru bilang ini kon-spirasi. Kita belum punya bukti. Cuma memang urutannya rapi sekali. Kapolri ganti, Kabareskrim ganti, besoknya Gibran dilapor-kan. Ini kebetulan atau kalender sedang punya selera humor?

Sementara itu, di MK, perkara Nomor 01/PHPU.Pres-XXIV/2026 tentang syarat pendi-dikan Gibran masih berjalan. Sidang pembuktian berlanjut dan

putusan dijadwalkan sekitar 5-6 Oktober.

Belum cukup? Datang lagi For-masi. Forum Mahasiswa Indonesia melaporkan sembilan hakim MK ke MKMK. Ketua Umumnya, Pian Andreo Halomoan Manu-rung, bersama kuasa hukum EDSA Partnership, menilai pem-eriksaan perkara tersebut diduga melanggar kode etik hakim konsti-tusi atau Sapta Karsa Utama.

Kuasa hukum Saddam Sitorus mempertanyakan proses pemerik-saan dinilai langsung masuk pem-buktian tanpa pemeriksaan penda-huluan dianggap memadai. Mereka juga mengangkat doktrin constitutional continuity. Jika norma dalam Putusan 90/2023 hendak dikoreksi, menurut mereka, perubahan sebaiknya ber-laku prospektif untuk pemilu atau pilkada berikutnya, bukan mengobrak-abrik pemerintahan yang sudah dilantik.

Nathaniel Hutagaol juga mem-persoalkan petitum pembatalan hasil penetapan KPU Pemilu 2024 dan menilai persoalan legal stan-

ding seharusnya dapat diperiksa sejak awal.

Maka lengkaplah penderitaan Mas Wapres. Dari MK dihantam, Bareskrim menunggu, sembilan hakim dilaporkan ke MKMK.

Lalu partai pengusung? Sunyi. Mungkin sedang rapat. Mungkin sedang menyusun strategi. Mung-kin sedang mencari payung. Atau jangan-jangan payungnya memang cuma dipakai saat kampanye.

Begitulah Politik. Ketika kursi masih empuk, semua mengaku saudara. Begitu badai datang, sau-dara berubah menjadi penonton, penonton berubah menjadi analis, analis berubah menjadi komentat-or, sementara yang duduk di tengah ring bertanya:

“Lah, saya ini dulu diusung siapa?”

Kalau semua ini kebetulan, kebetulannya luar biasa disiplin. Kalau konspirasi, buktinya belum ada. Kita jangan menuduh. Kita cukup duduk, seruput kopi, makan gorengan, lalu menunggu 5 Okto-ber.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

OPINI

Lagi, Putusan MK Tentukan Nasib Gibran

Oleh Redaksi · 5 Okt, 09.56 WIB



Oleh: Erizal((Direktur ABC Riset & Consulting))

ALAN diskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ditempuh pihak pemohon Denny Indrayana dan kawan-kawan memang tidaklah mudah.

Jalan yang panjang, berliku, dan juga mendaki. Terlihat ngos-ngosan juga saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melewati jalan itu.

Kata Hakim MK Saldi Isra, yang memimpin sidang pembuk-tian terkait ijazah SMA atau sede-rajat Wapres Gibran, "jangan ter-lalu dipaksakan. Tidak semua per-tanyaan harus dijawab, bantu Hakim Saldi Isra, terhadap saksi dan ahli dari pihak pemohon.

Agaknya, Hakim Saldi Isra juga melihat ketidakmudahan jalan yang ditempuh Denny Indrayana dan kawan-kawan itu.

Akhirnya, ada juga saksi dan ahli yang memaksakan diri tetap menjawab pertanyaan dari pihak termohon, terkait, dan terutama yang tajam-tajam dari Hakim MK sendiri.

Tapi ada juga ahli yang memilih tidak menjawab sesuai dengan saran dari Hakim Saldi Isra itu.

Awalnya cuaca, alam, dan lain sebagainya, seperti juga kurang mendukung pihak pemohon mele-wati jalan yang panjang, berliku, dan mendaki, menuju diskuali-fi-kasi Wapres Gibran itu.

Ada saja masalah yang muncul sebelum persidangan pembuktian itu dibuka.

Contohnya, tiba-tiba saja Hakim Ketua MK Suhartoyo tidak hadir dalam sidang pembuktian itu, karena ada suatu acara yang tak bisa diwakilkan.

Ia terbang ke luar negeri sana. Dan tiba-tiba saja juga salah seo-rang ahli dari pihak pemohon tidak bisa hadir, karena istrinya malam itu harus dilarikan ke rumah sakit (UGD).

Entah siapa ahli yang rencana-nya dihadirkan dan tiba-tiba istri-nya masuk UGD itu? Pihak pemo-hon tidak menyebutkan namanya.

Dan saat pemohon meminta ahlinya diganti, Hakim Saldi Isra, yang memimpin sidang tidak sedi-kiptun mentolerirnya. Tidak bisa. Titik.

Sempat agak tegang juga sua-sana antara pemohon dan Hakim Saldi Isra membahas ini dan Hakim Saldi Isra tetap dengan kesepakatan Hakim bahwa tidak boleh diganti. Dan ternyata, peng-ganti ahli yang disiapkan dan dilar-ang itu adalah Rocky Gerung.

Saat meminta tambahan waktu pun, karena ahlinya kurang satu dari pihak pemohon, maka tetap saja tak diberikan oleh Hakim Saldi Isra. "Jangan berlama-lama di sini Pak Bambang, "kunci Hakim Saldi Isra kepada kuasa hukum pihak pemohon.

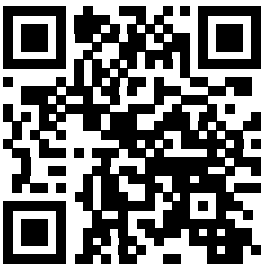
Tapi keseriusan Hakim MK juga layak diapresiasi dengan dihadirkannya pihak Kemendik-dasmen dan atase pendidikan di Singapura dan Australia. Baik pihak pemohon, termohon, terkait, maupun pemberi keterangan, kaget dengan keseriusan MK itu.

Untuk kedua kalinya nasib Gibran ditentukan oleh putusan MK, yang sifatnya final dan mengikat. Putusan pertama menguntungkan, yakni putusan nomor 90/2023. Putusan kedua ini, tidak ada yang tahu.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

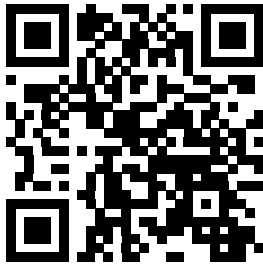
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



SPORT

3 BERITA

SPORT

Sempat Tertinggal, Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Usai Taklukkan Thailand Lewat Adu Penalti

Oleh Redaksi · 5 Okt, 23.36 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA — Timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati laga dramatis melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026).

Skuat Garuda harus melalui pertandingan hingga adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Indonesia akhirnya memastikan kemenangan melalui drama tos-tosan dengan skor 4-2, setelah dua eksekutor Thailand gagal menjalankan tugasnya.

Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Luke Vickery mengancam gawang Thailand pada menit kedua, tetapi tembakkannya masih dapat diamankan kiper Saranon Anuin. Enam menit kemudian, Anuin kembali menggagalkan peluang Indonesia melalui tembakan jarak jauh Mitchell Baker.

Thailand merespons lewat peluang Teerasak Poeipheimai pada menit ke-17. Namun, tembakan-

nya masih mampu diamankan Emil Audero. Sesaat kemudian, Chanathip Songkrasin mencoba memanfaatkan serangan berikutnya, tetapi bola melambung di atas mistar.

Indonesia kembali mendapatkan peluang pada menit ke-19 melalui Ole Romeny. Menerima umpan silang Kevin Diks, Romeny melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih melambung.

Tekanan Indonesia berlanjut. Pada menit ke-26, tembakan mendatar Diks setelah situasi sepak pojok kembali ditepis Anuin. Calvin Verdonk kemudian mencoba peruntungan melalui tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-32, tetapi bola melebar tipis.

Thailand juga beberapa kali mampu menciptakan peluang. Kerja sama Kakana Khamyok dan Suphanan Bureerat hampir menghasilkan gol, tetapi tendukan Poeipheimai masih melambung.

Menjelang turun minum, Indonesia memperoleh tendangan

bebas setelah Nicholas Mickelson melakukan pelanggaran terhadap Diks di depan kotak penalti Thailand. Verdonk yang menjadi eksekutor belum mampu memecah kebuntuan karena sepakannya membentur pagar hidup.

Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Thailand langsung memberikan ancaman melalui tendukan Supachai Chaiced pada menit ke-47, tetapi bola melebar. Indonesia membalas tiga menit kemudian lewat tembakan jarak jauh Ragnar Oratmangoen yang juga belum menemui sasaran.

Peluang emas Thailand hadir pada menit ke-59 ketika Khamyok lolos dari jebakan offside dan memasuki kotak penalti Indonesia. Namun, Justin Hubner sigap melakukan blok terhadap tembakan pemain Thailand tersebut.

Indonesia nyaris membuka keunggulan pada menit ke-69. Mitchell Baker mendapat ruang setelah menerima umpan terobosan dari lini belakang, tetapi tem-

bakannya hanya melebar tipis di sisi kanan gawang Thailand.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-81. Thailand harus bermain dengan 10 pemain setelah Mickelson diganjar kartu merah karena menjatuhkan Romeny di dekat kotak penalti.

Tendangan bebas Indonesia yang dieksekusi Dean James kemudian membentur Iklas Sanron. Bola berubah arah dan masuk ke gawang Thailand tanpa mampu diantisipasi Anuin.

Namun, keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Thailand menyambut Thailand tanpa jarak dekat yang membuat Audero tak berkutik.

Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

SPORT

Malam Ini! Indonesia vs Thailand Berebut Gelar Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Oleh Redaksi · 5 Okt, 08.57 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA — Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Pertandingan perebutan gelar juara kawasan Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB. Laga dapat disaksikan melalui siaran langsung SCTV dan Indosiar serta layanan streaming Vidio.

Indonesia memastikan tempat di partai puncak setelah tampil sebagai juara Grup A. Skuat Garuda mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, dengan mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua gol.

Sementara itu, Thailand datang ke final sebagai pemuncak Grup B. Tim berjuluk Gajah Perang tersebut mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan, dengan mencatatkan tujuh gol dan dua kali kebobolan.

Pertemuan Indonesia dan Thailand di final turnamen regional bukan kali pertama terjadi. Kedua tim tercatat sudah empat kali berhadapan di partai puncak Piala Tiger/Piala AFF.

Namun, dalam empat pertemuan tersebut, Indonesia belum mampu mengalahkan Thailand. Rekor itu tidak menjadi perhatian utama

pelatih Timnas Indonesia John Herdman menjelang pertandingan.

Herdman menilai skuad Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan dalam pertandingan, termasuk dari sisi postur dan usia pemain.

“Mereka memiliki jumlah penampilan internasional yang lebih banyak daripada kami. Di banyak posisi, kami memiliki pemain dengan postur yang lebih tinggi. Mereka memiliki rata-rata usia yang lebih tua, sedangkan kami lebih muda,” kata John Herdman.

Pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand akan menjadi penentu tim yang berhak mengangkat trofi kompetisi tersebut.

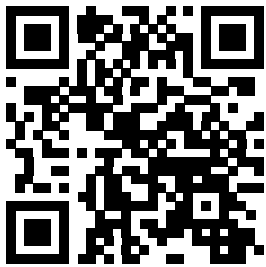
Jadwal Final FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia vs Thailand
Senin, 5 Oktober 2026
Pukul 20.00 WIB
Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Siaran langsung: SCTV dan Indosiar
Streaming: Vidio. []
Tag: Timnas Indonesia, Thailand, FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman, SUGBK

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

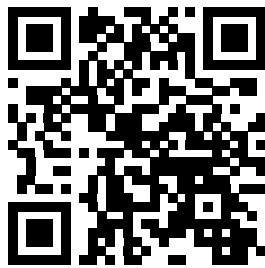
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



SPORT

Local Clubs and the Fans Who Back Them

Oleh Redaksi · 5 Okt, 17.00 WIB



A basketball coach gives strategic instructions to the players during a timeout in the middle of a game. The players, with towels around their necks and leaning forward, listen intently as the coach points to the strategy board. A serious atmosphere is evident on the faces of the entire team as they focus on the explanation of game tactics.

How Local Basketball Leagues Build Stronger Fan Communities in the Philippines

MANILA - A basketball team can do more for a town than entertain it on weekends. In the Philippines, provincial clubs have turned gyms into meeting places for whole communities. The effect is easiest to see in leagues built around cities and provinces. Find the nearest club to your barangay and watch what happens on game night.

Gyms That Double as Town Squares

Local leagues play in municipal venues that hold a few thousand people. Tickets stay cheap because the buildings are small and the costs are modest. Neighbours sit near the floor, and players hear every word from the stands. Ven-

dors outside the door do steady business on any home date. A game becomes a place where people from one town meet each week.

The same crowd carries its conversation onto phones once the final buzzer has sounded. Filipinos rank among the world's heaviest users of social platforms by time spent daily. Group chats that argue about rosters also discuss esports betting during the Mobile Legends season. That title draws the largest online audience in the country, and its finals fill feeds.

Those two worlds share the same audience and very often the same group chats. A fan who watches a provincial final on Facebook also follows an MPL series on YouTube. Both of these habits run on a phone rather than on a television set. Local clubs benefit

because the attention never has to leave the device. Community pages then turn that attention into ticket sales for the next home game.

Rosters Made of Familiar Names

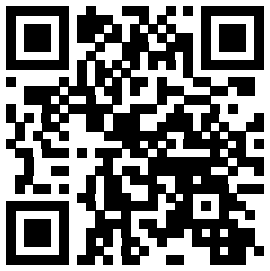
Community feeling depends heavily on who actually wears the jersey. Rules in the MPBL require each club to field at least three homegrown players. Those players went to school in the province and are known by name. Supporters treat them as neighbours who happen to play basketball for a living.

Familiarity changes the way supporters read a matchup well before it starts. People know which guard is carrying an injury long before any written report appears. Fans in the provinces

sometimes check an MPBL betting site against what the gym already tells them. Odds on regional basketball move quickly because squads rotate and provincial travel is heavy. Licensed operators must also display responsible gambling warnings under new rules tightened.

Local rosters also keep young players close to the places where they grew up. A teenager from the same town can watch someone he trained with start a game. That link gives local youth programmes something concrete to aim at. Former professionals now play in the league as well, which raises the level around them.

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id
Pindai kode QR untuk berita terbaru

HIBURAN

3 BERITA

HIBURAN

Imbas Temuan 3 Kontainer di Lapas Cibinong, Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Dicabut

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.59 WIB



BANDA ACEH - Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencabut pembebasan bersyarat (PB) yang sebelumnya diberikan kepada terpidana Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Imipas menemukan adanya persoalan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat tersebut.

"Ya, kita cabut (bebas bersyaratnya) karena ada proses remisinya yang tidak benar," kata Agus di Jakarta, Senin (5/10).

Dengan pencabutan pembebasan bersyarat tersebut, Indra Kenz harus kembali menjalani sisa masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Namun, Agus belum menjelaskan secara rinci mengenai waktu pelaksanaan pengembalian Indra Kenz ke lapas.

Persoalan ini mencuat setelah Kemenimipis menemukan sejumlah barang di tiga hunian berbentuk kontainer yang berada di ling-

kungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Barang-barang tersebut disebut berkaitan dengan Indra Kenz.

Temuan itu kemudian menjadi bagian dari evaluasi terhadap pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus penipuan investasi melalui aplikasi opsi biner atau binary option Binomo tersebut.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imipas Rudi Setiawan menjelaskan, tiga kontainer yang ditemukan di Lapas Cibinong tercatat sebagai barang milik negara. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, sejumlah barang yang berada di dalamnya diduga digunakan atau dimiliki oleh warga binaan.

"Ada kontainer, ada tiga kontainer. Kontainer ini semua tercatat, tercatat di barang milik negara, tetapi isinya diadakan oleh warga binaan," ungkap Rudi di Jakarta, Senin (5/10).

Dari hasil penelusuran tersebut, nama Indra Kenz turut muncul. Rudi menyebut pihaknya menemukan keterkaitan Indra Kesuma dengan fasilitas yang berada di dalam lingkungan lapas.

"Sebagaimana sudah ketemu di sana dan salah satunya adalah itu Indra Kesuma, Indra Kenz," ujar Rudi.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas dengan merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

"Dan ya sudah kami rekomendasikan kepada Dirjen PAS untuk ditarik kembali," jelas Rudi.

Sebagaimana diketahui, Indra Kenz mendapatkan pembebasan bersyarat sehingga dapat meninggalkan Lapas Cibinong pada Kamis (24/9). Ia merupakan terpidana dalam perkara penipuan investasi melalui platform binary option Binomo.

HIBURAN

Mengkhawatirkan, Dede Sunandar Jalani CT Scan Kepala usai Dipukul Vicky Prasetyo

Oleh Redaksi · 5 Okt, 13.26 WIB



BANDA ACEH - Komedian Dede Sunandar menjalani pemeriksaan CT scan kepala setelah sempat tak sadarkan diri atau blackout usai terkena pukulan Vicky Prasetyo dalam pertandingan tinju di Jambi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kepala Dede setelah insiden yang membuatnya tumbang di atas ring. Dede menyampaikan kabar terbaru itu melalui video yang diunggah Vicky Prasetyo di Instagram.

"Pak Vicky nganterin Dede buat ke rumah sakit untuk cek CT Scan buat kepala, karena kemarin di Jambi baru paru-paru," ujar Dede dalam video tersebut, dikutip Senin (5/10/2026).

Dede mengatakan dirinya bersyukur karena kondisi kesehatannya saat ini baik. Dia juga mengapresiasi Vicky yang tetap mendampingi sejak kejadian di atas ring hingga menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Terima kasih banyak juga buat Pak Vicky nih yang sudah memanusia di saat-saat pertandingan kejadian itu," kata Dede.

Menurut Dede, Vicky tidak meninggalkannya setelah insiden terjadi. Vicky malah ikut mengurus Dede sejak proses evakuasi menggunakan ambulans hingga tiba di rumah sakit.

"Pak Vicky masih ngurusin Dede dari ke ambulans, jadi enggak tahu pokoknya memang sudah breakout sampai rumah sakit. Alhamdulillah nunggu di depannya juga Pak Vicky," tuturnya.

Dede juga kembali menegaskan bahwa pertandingan yang mempertemukannya bersama Beddu

melawan Vicky merupakan pertarungan sungguhan. Dia memastikan tidak ada rencana sebelumnya terkait insiden yang terjadi di atas ring.

"Memang ini kami fighting-nya itu benar-benar, dan tidak ada rencana sama sekali. Tidak ada sentimen," ujar Dede.

Di sisi lain, Vicky mengatakan para peserta pertandingan tidak mengetahui seberapa keras pukulan yang akan diterima selama berada di atas ring. Menurutnya, suasana pertandingan yang memanas turut membuat mereka semakin terbawa emosi untuk memberikan penampilan terbaik.

"Kami enggak tahu seberapa kerasnya. Jadi mungkin itu, waktu pas aku maju, mungkin emosinya masih memuncak," kata Vicky.

Vicky pun menyampaikan permintaan maaf setelah insiden tersebut. Dia menilai kejadian itu menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa keselamatan dan sportivitas tetap menjadi hal penting dalam pertandingan.

"Saya secara pribadi ingin minta maaf. Tidak inginlah tidak sadar dan lain-lain. Ini pembelajar bahwa yang penting itu kesetaraan dan lain-lain," tuturnya.

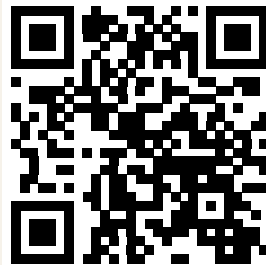
Sebelumnya, Dede sempat tumbang dan kehilangan kesadaran setelah terkena pukulan Vicky dalam pertandingan Kapolda Fighter Match 2026 di GOR Kota Jambi, Sabtu (3/10/2026) malam.

Setelah kejadian tersebut, Dede mendapat penanganan tim medis dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Kini, dia menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi kepalanya setelah insiden tersebut.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

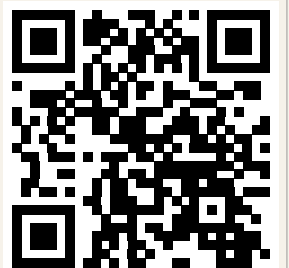
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



HIBURAN

Menteri Imipas Bakal Cabut Pembebasan Bersyarat Indra Kenz: Proses Remisinya Tak Benar

Oleh Redaksi · 5 Okt, 18.54 WIB



BANDA ACEH - Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pembebasan bersyarat (PB) Terpidana investasi bodong Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz akan dicabut. Keputusan itu diambil karena ditemukan ketidaksesuaian dalam proses remisi yang menjadi dasar pemberian hak pembebasan itu.

"Akan kita cabut (pembebasan bersyarat), karena ada proses remisinya yang tidak benar," kata Agus di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Meski demikian, Agus tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk ketidaksesuaian dalam proses remisi tersebut. Namun, Kementerian Imipas sebelumnya telah

merekomendasikan penarikan pembebasan bersyarat Indra Kenz. Rekomendasi itu mencuat setelah nama Indra Kenz disebut terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imipas Rudi Setiawan menjelaskan, temuan fasilitas di lapas tersebut mencakup guest house yang sebelumnya merupakan bangunan kantor untuk sarana asimilasi dan edukasi.

"Ada bentuk bangunan lama. Tadinya ini adalah kantor yang digunakan untuk gudang dan kantor sarana asimilasi dan edukasi. Tapi kemudian diubah menjadi guest house," kata Rudi.

Menurut dia, guest house tersebut dibangun secara swadaya oleh

warga binaan. Bangunan itu kemudian digunakan sebagai tempat menerima kunjungan.

"Sumber dananya juga dari warga binaan dan digunakan untuk menerima kunjungan, ketika warga binaan menerima kunjungan dilakukan di tempat tersebut," ujarnya.

Diketahui, Indra Kenz bebas bersyarat sejak Kamis (24/9/2026). Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Bogor, Jatmiko mengatakan Indra masih harus menjalani wajib lapor ke pihaknya sebulan sekali.

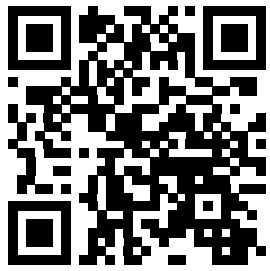
"Iya betul hari Kamis mulai menjadi klien kami untuk menjalani pembebasan bersyarat," kata Jatmiko, saat dihubungi Sabtu (26/9/2026).

Sebelumnya, Indra Kenz dihukum 10 tahun penjara pada 2022. Putusan banding Pengadilan Tinggi Banten nomor PID/SUS/2022/PT BTN tanggal 10 Januari 2023 juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada 14 November 2022.

PT Banten juga menjatuhkan denda Rp5 miliar subsider 10 bulan tetapi dengan perintah agar aset-aset Indra Kenz dikembalikan kepada para korban.

Indra kenz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan

BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id
Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

2 BERITA

IN-DEPTH

Sinyal Prabowo Tempatkan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom

Oleh Redaksi · 5 Okt, 20.39 WIB



Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan. FOTO/Tangkapan Layar

DA sesuatu yang menarik dari pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jumat, 2 Oktober 2026.

Bukan hanya soal pergantian pejabat dari Muhammad Qodari kepada seorang aktivis yang selama bertahun-tahun dikenal kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga siapa yang kini berada di balik meja komunikasi pemerintah.

Syahganda bukan wajah baru dalam pertarungan opini Politik Indonesia. Ia tumbuh dari tradisi aktivisme, pernah menjadi bagian dari gerakan oposisi terhadap pemerintahan, dan namanya pernah berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum pada masa Presiden Joko Widodo.

Kini, orang yang dahulu berdiri di luar pagar kekuasaan justru ditempatkan Presiden Prabowo Subianto di salah satu posisi yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan.

Prabowo melantik Syahganda sebagai Kepala Bakom bersama Fadli Tri Hartono sebagai wakil-

nya di Istana Negara. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang dipindahkan menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota.

Pelantikan tersebut bahkan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah pengucapan sumpah, para pejabat baru menerima ucapan selamat dari Prabowo dan Gibran.

Di sinilah politik menjadi menarik. Bagaimana membaca keputusan Prabowo memilih Syahganda?

Syahganda memiliki sejarah panjang sebagai aktivis dan Pengamat Politik. Ia aktif sejak menjadi mahasiswa ITB pada era 1980-an. Dalam perjalanan politiknya, ia pernah terlibat dalam berbagai gerakan dan kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI.

Namanya juga pernah berada di balik jeruji besi.

Pada Oktober 2020, Syahganda ditangkap dalam kasus yang berkaitan dengan aksi penolakan UU Cipta Kerja. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepadanya. Ia didakwa menggunakan ketentuan pidana terkait penyebaran informasi yang dianggap berkaitan dengan kericuhan demonstrasi.

Peristiwa itu terjadi ketika pemerintahan Jokowi sedang menghadapi tekanan politik besar akibat gelombang demonstrasi menolak Omnibus Law.

Syahganda menjadi salah satu simbol kelompok kritis yang berhadapan dengan pemerintah.

Namun politik Indonesia memiliki satu kebiasaan yang terus berulang.

Orang yang kemarin berdiri di luar kekuasaan bisa saja besok duduk di dalam kekuasaan.

Dan hari ini Syahganda sudah berada di dalam Istana.

Ada kelompok yang mungkin berpikir bahwa setelah mendapatkan jabatan, Syahganda akan berubah. Dari pengkritik menjadi pejabat. Dari orang yang lantang

berbicara tentang kekuasaan menjadi orang yang harus menjelaskan kebijakan pemerintah.

Tetapi membaca Syahganda tidak bisa hanya dari jabatan barunya.

Justru rekam jeaknya dalam dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa isu Gibran dan lingkaran politik keluarga Jokowi merupakan salah satu tema yang cukup sering ia soroti.

Pada Oktober 2025, misalnya, Syahganda mengkritik kapasitas dan legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Ia mempertanyakan pengalaman dan modal politik Gibran serta menyinggung kemungkinan pemakzulan wakil presiden.

Pada September 2026, bahkan sebelum dilantik sebagai Kepala Bakom, Syahganda kembali membicarakan kemungkinan hubungan Prabowo dan Gibran mengalami keretakan. Ia menggunakan contoh hubungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

TEKNOLOGI

Ulasan Redmi Note 17 5G: Dirancang dengan Fokus pada Baterai, Bukan Skor Benchmark

Oleh Redaksi · 5 Okt, 19.34 WIB



Redmi Note 17 5G mengalokasikan anggarannya pada aspek yang paling krusial bagi pengguna—yakni daya tahan baterai dan dukungan jangka panjang—sebagai ganti penggunaan chip yang lebih sederhana.

Di atas kertas, keseluruhan ponsel ini dirancang dengan berpusat pada satu angka: baterai silikon-karbon berkapasitas 7.700 mAh. Komponen pendukungnya meliputi layar AMOLED 6,99 inci, cip Snapdragon 4 Gen 4, kamera tunggal 50 MP, perlindungan IP65, serta pembaruan keamanan hingga tahun 2032.

Redmi Note 17 5G tidak tampil mencolok secara berlebihan, dan justru itulah kelebihanannya. Smartphone ini bisa menjadi teman untuk mengakses Nonton Bola Gratis dimanapun Anda berada.

Modul Kamera

Xiaomi menyebut bagian belakangnya memiliki sentuhan akhir ganda (dual finish); artinya, panel bodi utama dan modul kamera mendapatkan perlakuan desain yang berbeda. Panel utamanya memiliki tekstur *matte* halus yang warnanya tampak berubah mendekati abu-abu grafit saat minim cahaya, sedangkan modul kameranya tampil mengkilap (glossy).

Modul kamera itulah yang memberikan karakter pada desain ponsel ini. Bentuknya berupa persegi dengan sudut membulat di pojok kiri atas, memuat modul mengkilap berbentuk kapsul yang menampung dua lingkaran: kamera utama 50 MP serta lensa kedua kecil di bagian atas dan lampu kilat di bawahnya, ditambah sebuah cakram kecil bertekstur brushed dengan tulisan "50 MP".

Tata letaknya terasa seimbang dan rapi, membuat ponsel dengan kamera tunggal ini tetap terlihat lengkap dan proporsional. Bagian belakang yang bertekstur matte

tetap bersih meski sering disentuh, dan hanya bagian modul kamera yang mengkilap yang sesekali meninggalkan bekas sidik jari. Bingkainya datar dengan sudut membulat dan sentuhan akhir bergaya metalik, sementara bagian depannya pun tak kalah simpel: layar datar 6,99 inci dengan kamera punch-hole kecil.

Desainnya rapi dan proporsional, lebih mengutamakan kesederhanaan daripada kesan mencolok; dalam warna hitam, ponsel ini tampil bersahaja. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih unik, Xiaomi juga menyediakan dalam pilihan warna Sky Teal dan Celestial Purple.

Ergonomi

Angka-angka spesifikasi sudah banyak menjelaskan segalanya. Redmi Note 17 5G memiliki dimensi 169,7 x 79,14 x 8,45 mm dengan bobot 225 g. Ini adalah ponsel yang cukup besar dan berat, dan bobotnya adalah hal pertama yang Anda rasakan saat memegangnya. Wajar saja, mengingat ponsel ini memuat baterai 7.700 mAh di dalam bodi yang ketebalannya kurang dari 9 mm.

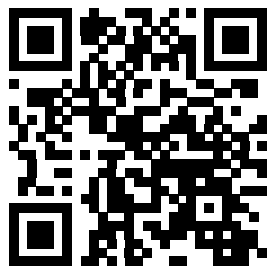
Sisi-sisi datar dan sudut membulat membuat ukurannya tetap nyaman digunakan, ditambah lagi bagian belakangnya yang bertekstur matte tidak licin. Tombol daya dan pengatur volume terletak di sisi kanan, sedangkan pemindai sidik jarinya menggunakan teknologi optik yang tertanam di bawah layar. Fitur Wet Touch 2.0 dari Xiaomi memastikan layar tetap responsif meski disentuh dengan jari yang agak basah—sangat berguna saat cuaca lembab. Dengan lebar hampir 80 mm, ponsel ini paling nyaman dioperasikan menggunakan dua tangan, yang juga sangat pas untuk memaksimalkan layar besarnya saat membaca atau menonton video.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

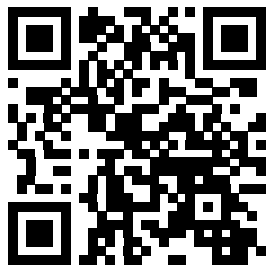
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia